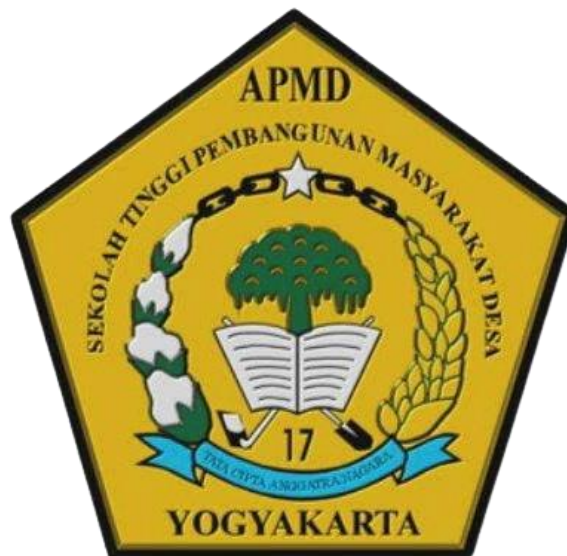


**KEWENANGAN KALURAHAN DALAM PENGELOLAAN DANA
KEISTIMEWAAN KALURAHAN MANDIRI BUDAYA DI
KALURAHAN JERUKWUDEL, KAPANEWON GIRISUBO,
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

SKRIPSI



Disusun oleh :

EKY SEMARTBOY (19520070)

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA I
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN JUDUL

**KEWENANGAN KALURAHAN DALAM PENGELOLAAN DANA
KEISTIMEWAAN DESA MANDIRI BUDAYA DI KALURAHAN
JERUKWUDEL, KAPANEWON GIRISUBO, KABUPATEN GUNUNG
KIDUL**

**APMD
SKRIPSI**

**Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata (1)
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”**

**Disusun Oleh :
YOGYAKARTA
EKY SEMARTBOY**

NIM 19520070

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

YOGYAKARTA

2023



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta:

Hari : Jum'at
Tanggal : 7 Juli 2023
Jam : 10:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

Nama

Tanda Tangan

1. Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si

Ketua/Pembimbing

2. Dr. R. Widodo Triputro, MM., M.Si

Penguji Samping I

3. Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si

Penguji Samping II

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos.M.Si



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eky Semartboy

NIM : 19520070

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Kewenangan Kalurahan Dalam Pengelolaan Dana Keistimewaan Kalurahan Mandiri Budaya di Kalurahan Jerukwudel, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul” adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 7 Juli 2023

Peneliti



Eky Semartboy

19520070

HALAMAN MOTTO

“Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu”

(Matius 19:30)

“Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah”

(Roma 8:28)

“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan”

(Yesaya 41:10)

“Apabila melakukannya demi dirimu sendiri kurang memotivasimu, maka setidaknya lakukanlah untuk orang-orang yang kamu cintai”

(Eky Semartboy)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya ucapkan ke hadirat Allah Bapa di Surga atas kelimpahan rahmat dan kebaikannya yang tidak terhingga berupa kesehatan, kesempatan, waktu, kemampuan dan segala kemudahan yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar. Peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang disayangi dan dibanggakan yang diantaranya adalah:

1. Kepada Almarhum Kornelius Akiong dan Almarhum R. Sudarno Kimpa yang selama ini sudah menjadi motivasi terbaik dalam menjalani hidup. Kasih sayang, doa restu dan semangat yang kalian berikan adalah alasan peneliti bisa menjalani hidup hingga detik ini. Terima kasih atas setiap hal yang telah kalian lakukan terhadap saya. Semoga kalian melihat dengan bangga dari Surga.
2. Kepada sponsor utama peneliti yaitu kedua orang tua, Hendri Pribadi dan Julia Carly yang telah bersedia repot-repot membiayai segala kebutuhan peneliti dari semenjak dilahirkan hingga saat ini. Terima kasih atas semua jerih payah yang dilakukan demi mensponsori kuliah peneliti hingga tuntas. Tidak ada satupun kata-kata di dunia ini yang cukup indah untuk dapat mendeskripsikan rasa cinta dan terima kasih peneliti kepada kalian.
3. Kepada seluruh keluarga besar, Thaipak, Ong Khiu Kung dan lainnya yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu, terima kasih karena selalu

memberikan semangat dan kepedulian terhadap peneliti. Semoga kiranya Tuhan membalas semua kebaikan kalian terhadap peneliti.

4. Kepada Dosen Pembimbing peneliti yaitu Ibu Hari Saptaning Tyas, M.Si, terima kasih karena sudah menjadi pembimbing yang bersahabat dan selalu sabar dalam membimbing peneliti dalam menyusun skripsi. Terima kasih atas kesan baik yang selalu Ibu berikan, semoga kiranya Ibu sehat selalu dan semoga Tuhan membalas kebaikan Ibu berkali lipat ganda.
5. Kepada Lurah Kalurahan Jerukwudel beserta segenap Pamong Kalurahan Jerukwudel dan masyarakat Jerukwudel yang telah bersedia menerima kehadiran peneliti sekaligus membantu proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena sudah menerima peneliti dengan hangat dan nyaman, semoga kiranya Tuhan membalas kebaikan kalian.
6. Kepada Diana Artanti Amelia Wijaya, terimakasih karena telah bersedia diminta oleh Tuhan untuk hadir di kehidupan peneliti di waktu yang sangat tepat. Terimakasih juga karena sudah mau repot-repot mendampingi peneliti hingga saat ini. Terima kasih atas segala macam dukungan baik itu materi maupun perasaan.
7. Kepada teman-teman dan sahabat perkuliahan yang kenal pada awal masuk perkuliahan, peneliti mengucapkan terima kasih banyak dengan memberikan dukungan dan motivasi diantaranya yaitu Intan Novi Astuti, Meiditha Ananda Putri, Sofia Grace Adeline, Lusi Ratna Wianti, Rivaldo Rustandi Emanuel, Silvia Wela Marlina, Giacinta Ines Purba, Yosa Miranda, Anggita Anggraini

Putri, Agnes, Tiofilus, Ray Palmer, Ezra vii Ohta, Otarida Al Asri, Josua Liow, Rofiq Aditya Damawan yang sudah membantu proses penyusunan skripsi. Tidak lupa juga peneliti ucapkan terima kasih kepada sekelompok orang baik Anum, Sendy, Nersi dan Bella yang sudah menjadi teman yang luarbiasa pula dan teman-teman tercinta semuanya yang tidak bisa peneliti sebutkan semua.

8. Kepada sahabat rasa saudara seatap, sekuali, sekasur, anak anak kontrakan semua yang sudah menajadi teman merantau yang luarbiasa. Terima kasih karena sudah saling menjaga satu sama lain. Semoga kiranya kita semua dapat sukses dan membangun Kabupaten Melawi.
9. Kepada teman-teman kepengurusan dan anggota FOKUS MAPAWI Yogyakarta, terima kasih karena sudah menjadi teman berdinamika dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.
10. Untuk kampus STPMD “APMD” Yogyakarta dan KOMAP yang telah menjadi tempat saya berproses, belajar, menambah ilmu dan pengalam-pengalaman yang berharga.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Allah Yesus Kristus YME atas karunia dan rahmatnya yang telah memberikan kemudahan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Kewenangan Desa Dalam Pengelolaan Dana Keistimewaan Desa Mandiri Budaya di Kalurahan Jerukwudel, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul**” ini dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan doa, bimbingan maupun saran yang berguna dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti bukan hanya menyelesaikan sendiri, dengan segenap kerendahan hati peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada:

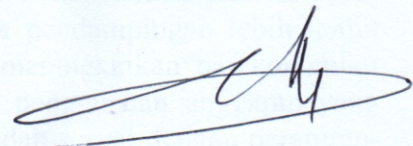
1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos.M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang menjalankan civitas akademika STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Ibu Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si selaku Dosen Pembimbing terencana, yang telah mengarahkan dan memberikan banyak saran kepada peneliti dengan penuh kesabaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membekali banyak pengetahuan selama menempuh pendidikan di STPMD “APMD” Yogyakarta.
5. Bapak M. Firdaus yang menjadi Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan selama menempuh pendidikan di STPMD “APMD” Yogyakarta.
6. Bapak Juang Gaga Mahardika yang selalu bersedia untuk menjadi teman diskusi terkait skripsi yang peneliti tulis.
7. Pemerintah dan Masyarakat di Kalurahan Jerukwudel yang telah memberikan ruang, tempat dan waktu serta menjadi teman diskusi selama peneliti melaksanakan penelitian.
8. Orang tua, sahabat dan teman-temn semua yang telah memberikan dukungan, dorongan serta motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman peneliti di masa mendatang.

Yogyakarta, 7 Juli 2023

Peneliti



Eky Semartboy

INTISARI

Pemerintah Kalurahan Jerukwudel mendapatkan bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui program strategis DIY yaitu Desa Mandiri Budaya. Dana tersebut dihibahkan kepada Pemerintah Kalurahan Jerukwudel demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengembangkan potensi-potensi baik wisata maupun budaya sebagai sumber penghasilan mereka. Desa mandiri budaya terdiri dari empat pilar yaitu Preneur, Prima, Budaya dan wisata, akan tetapi beberapa pilar seperti Prima, Preneur dan Wisata yang menjadi fokus dari Desa mandiri budaya itu sendiri masih belum sepenuhnya tersentuh dan belum memberikan dampak langsung terhadap kehidupan perekonomian masyarakat. Tujuan penelitian ini sendiri untuk mendeskripsikan kewenangan Kalurahan Jerukwudel dalam mengelola dana keistimewaan desa mandiri budaya dan dengan rumusan masalah bagaimana kewenangan Kalurahan Jerukwudel terhadap pengelolaan dana keistimewaan desa mandiri budaya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam pemilihan informan, peneliti memilih informan yang dianggap mampu dan berkaitan dengan fokus penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu Lurah, Carik, Pangripta, Danarta, Ketua BPKAL, Panewu, Ketua POKDARWIS, beberapa Dukuh dan tokoh masyarakat setempat, Penelitian berlokasi di Kalurahan Jerukwudel, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk teknis dalam menganalisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

Hasil dari penelitian tentang Kewenangan Kalurahan dalam Pengelolaan Dana Keistimewaan Budaya di Kalurahan Jerukwudel, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, mengungkap bahwa Pemerintah Kalurahan Jerukwudel tidak memiliki kewenangan penuh dalam mengelola BKK Danais Mandiri Budaya. Keputusan akhir akan tetap berada di pihak Dinas Panaradya Kaistimewaan. Terkait kebijakan dalam pengelolaannya pun masih belum maksimal dikarenakan rendahnya kemampuan Pemerintah Kalurahan dalam merancang dan membagi sumber daya yang ada kepada setiap sektor pilar Desa mandiri budaya yaitu Preneur, Prima, Budaya dan Wisata. Pilar Preneur dan Prima hingga saat ini masih belum ada perkembangan yang signifikan, kegiatan-kegiatan/program yang dijalankan terkait kedua pilar tersebut masih belum menemui hasil dikarenakan tidak adanya pendampingan lebih lanjut hingga dua pilar tersebut dapat berjalan dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun jika berbicara tentang kesesuaian penggunaan anggaran yang dilakukan Pemerintah Kalurahan Jerukwudel saat ini sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengatur alur pengelolaannya.

Kata kunci: Otoritas, Pengelolaan, Dana Keistimewaan, Mandiri Budaya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	viii
INTISARI	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Fokus Penelitian.....	13
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Manfaat Penelitian.....	14
a. Manfaat Akademis.....	14
b. Manfaat Teoritis.....	15
F. Literature Review	15
G. Kerangka Konseptual	20
a. Otoritas/Kewenangan Desa	20
b. Pengelolaan Keuangan Desa	28
c. Pengelolaan Dana Keistimewaan.....	33
d. Desa Mandiri Budaya	40

H. Metode Penelitian.....	49
a. Jenis Penelitian.....	49
b. Unit Analisis	49
c. Teknik Pengumpulan Data	51
d. Teknik Analisis Data.....	53
BAB II DESKRIPSI KALURAHAN JERUKWUDEL	56
A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian	56
B. Visi dan Misi Kalurahan Jerukwudel	58
C. Kondisi Ekonomi Desa	61
D. Kondisi Geografis Kalurahan Jerukwudel.....	62
E. Kondisi Demografi Kependudukan Kalurahan Jerukwudel.....	63
F. Potensi dan Daya Tarik Desa Mandiri Budaya Jerukwudel	67
G. Aktor Yang Terlibat Dalam Pengelolaan BKK Dais Mandiri Budaya.....	70
H. Pengelolaan BKK Dais oleh Pemerintah Kalurahan Jerukwudel.....	71
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	75
A. Hak Kalurahan Jerukwudel dalam Pengelolaan BKK Dais Kalurahan Mandiri Budaya.	76
B. Kebijakan Pemerintah Kalurahan Jerukwudel terkait Pengelolaan BKK Dana Kesitimewaan Kalurahan Mandiri Budaya.	80
C. Kesesuaian Penggunaan BKK Dais Desa Mandiri Budaya oleh Pemerintah Kalurahan Jerukwudel.....	87
BAB IV KESIMPULAN dan SARAN.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Informan Penelitian	50
Tabel 2. 1 Persebaran Penduduk Kalurahan Jerukwudel	57
Tabel 2. 2 Data Kependudukan berdasarkan Pendidikan	64
Tabel 2. 3 Tabel Data Kependudukan Berdasarkan Pekerjaan.....	65
Tabel 2. 4 Data Kependudukan Berdasarkan Agama.....	66
Tabel 2. 5 Nama Kesenian di Jerukwudel	69
Tabel 2. 6 BKK DAIS TAHUN 2022	72
Tabel 2. 7 BKK DAIS TAHUN 2023	73

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Struktur Kalurahan Jerukwudel.....	70
--	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan luas geografis yang sangat luar biasa dengan keunikan masing-masing yang dimiliki oleh setiap daerahnya. Sayangnya, kelebihan Indonesia sebagai negara yang luas malah menjadi pedang bermata dua untuk kita sendiri. Keadaan geografis negara luas ini membuat pemerintah sejak jaman dahulu kesulitan untuk pemeratakan pembangunan dan kesejahteraan. Oleh karena itu masih banyak daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya masih tinggi dan membuat kesejahteraan di lokasi tersebut menjadi jauh tertinggal. Biasanya daerah-daerah tersebut terletak jauh dari Kota. Jarak mereka yang jauh dari kota membuat perbedaan kesejahteraan antara daerah pedalaman dan kota sangatlah tidak seimbang karena pembangunan seringkali lebih difokuskan ke daerah perkotaan. Sedangkan daerah-daerah terpencil malah dianaktirikan. Kebiasaan buruk seperti itu terus saja dilakukan berulang kali hingga akhirnya perbedaan kota dan Desa menjadi sangat terasa, bahkan juga perbedaan antar pulau di luar jawa dan pulau jawa memiliki perbedaan yang signifikan dalam masalah kemampuan dan sumber daya manusia.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan teritorial yang diakui dan mempunyai hak dan wewenang dalam mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dijunjung tinggi dalam struktur politik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan di desa memerlukan banyak partisipasi dan kontribusi

masyarakat di dalam pelaksanaannya. desa merupakan unit pemerintahan yang terkecil di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang besar ini merupakan kesatuan dari Desa-Desa kecil yang ada di setiap sudut negeri. Untuk mengubah sebuah negeri yang luas ini tidak bisa secara sekaligus, tetapi harus melalui unit-unit terkecilnya yaitu Desa. Seperti yang dikatakan oleh Mohammad Hatta bahwa “Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tetapi Indonesia baru akan bercahaya dengan lilin-lilin di desa”. Oleh karena itu, satu-satunya cara agar negeri seluas ini dapat sejahtera adalah dengan cara membangun dari desa terlebih dahulu. desa memiliki posisi paling strategis dalam hal meningkatkan ekonomi masyarakat dan masalah pemberdayaan. Hal itu karena desa adalah unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Desa bisa dengan lebih mudah menyentuh masyarakat secara langsung dan itu dianggap sebagai solusi yang lebih efektif dan efisien dalam hal meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa.

Beberapa daerah di Indonesia memang mendapatkan hal-hal yang berbau khusus atau lebih istimewa dibandingkan beberapa daerah lainnya. Hal tersebut dapat diperoleh atas dasar rasa terimakasih karena jasa yang diberikan kepada pemerintah pusat. Keistimewaan ini diperoleh oleh Daerah Istimewa Yogyakarta, keistimewaan atau kekhususan ini diperoleh karena Kasultanan Mataram sangat berjasa pada awal mula terbentuknya negara ini. Sebagai rasa terimakasih maka diberikanlah otonomi khusus terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta dan membuat Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kewenangan yang istimewa pula. Kewenangan istimewa ini merupakan kewenangan spesial yang diberikan kepada pemerintah DIY, kewenangan tersebut istimewa dibandingkan dengan

kewenangan-kewenangan lain yang telah diatur oleh undang-undang tentang pemerintah daerah lainnya. DIY memiliki kewenangan yang berbeda tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah DIY.

Adapun kewenangan dalam urusan keistimewaan tersebut meliputi:

- a. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
- c. Kebudayaan;
- d. Pertanahan; dan
- e. Tata ruang.

Undang-Undang Keistimewaan telah ada sedari tahun 2012. Dari Undang-Undang itu kemudian membuahkan hasil yaitu lahirnya dana keistimewaan yang diberikan khusus kepada Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini sesuai dengan Pasal 42 UUK yang menyatakan bahwa: Pemerintah menyediakan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan keistimewaan DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan negara.

Dana Keistimewaan DIY adalah bantuan keuangan yang dialokasikan oleh negara yang berasal dari Bendahara Umum negara dan dialokasikan untuk mendanai keistimewaan yang dimiliki oleh Yogyakarta. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memutuskan untuk memberikan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan yang akan disalurkan dari Pemerintah Daerah melalui Pemerintah Kabupaten, dalam rangka

percepatan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan, demikian Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2020.

Pemerintah DIY berusaha untuk memanfaatkan keistimewaan yang mereka miliki, apalagi dengan adanya dana khusus yaitu Dana Keistimewaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Beberapa program sudah mereka rancang untuk bisa meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sekaligus untuk melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang mereka miliki. salah satunya adalah dengan memperkenalkan Program Desa Mandiri Budaya. Program ini bertujuan untuk mendongkrak sosial-ekonomi sekaligus budaya masyarakat yang berada di daerah-daerah tertinggal. Desa mandiri adalah desa yang memiliki keinginan kuat untuk maju, menghasilkan barang atau karya seni yang dibanggakan masyarakatnya serta mampu memenuhi kebutuhan warganya. Dengan kata lain, niat, usaha, dan kemandirian merupakan fondasi utama desa mandiri budaya. Sebuah desa dapat dikatakan sebagai desa mandiri jika Trisakti desa dapat terlaksana. Trisakti desa itu sendiri adalah Karsa, Karya, Sembada. Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan beberapa hal yang dapat mendongkrak kapasitas dan perekonomian masyarakat. Misalnya, pengembangan kegiatan ekonomi desa dan antar desa, penguatan sistem partisipatif desa, dan terciptanya masyarakat di desa yang kuat secara ekonomi dan sosial budaya serta memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pembangunan dan pemberdayaan Desa. Ketiga kekuatan inilah yang menjadi tumpuan bidang ekonomi, budaya, dan sosial yang dicakup oleh karsa, pekerjaan, dan kemandirian Desa. (Lendy W Wibowo dalam Budi Harjo, 2017, Model Membangun Desa Mandiri).

Desa mungkin adalah solusi dari masalah kemiskinan yang sudah mengakar di Indonesia. Selama ini kemiskinan selalu menjadi beban bagi negara dan ternyata masalah ini tidak akan selesai jika hanya dengan diberikan bantuan sosial. Salah satu solusinya adalah kehadiran desa yang mandiri. Desa adalah lembaga pemerintah terdekat yang bisa menjangkau kemiskinan dengan lebih mudah. Dengan menjadi mandirinya desa dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri maka secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak terhadap kemiskinan di daerah tersebut. Masalah kemiskinan harus diatasi untuk mengurangi jumlah masyarakat yang terbelakang dalam hal sosial maupun ekonomi. Pemerintah Indonesia sadar bahwa mereka harus lebih memperhatikan masalah kemiskinan. Jika tidak mampu menyelesaikan masalah ini, tentunya dapat memicu munculnya sejumlah masalah sosial, ekonomi, dan politik di lingkungan sekitar masyarakat. Karena sarana dan prasarana yang tidak memadai, hal itu membuat masyarakat miskin biasanya mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha, masyarakat miskin akan menjadi semakin tertinggal jauh dari mereka yang memiliki akses dan memiliki potensi yang lebih besar karena mereka kesulitan untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas. Menurut Janianton Damanik (2018), kemiskinan merupakan salah satu indikator pembangunan yang sangat penting. Seberapa maju dan berhasil pembangunan akan tampak dari perubahan-perubahan yang signifikan pada besarnya kemiskinan itu sendiri. Itu menjadi alasan kenapa kemiskinan merupakan hal penting, karena dengan adanya kemiskinan pemerintah akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikannya.

Desa Mandiri Budaya adalah salah satu program strategis yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta

merupakan daerah otonomi khusus yang diberikan keistimewaan hak/kewenangan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan dibekali otonomi khusus tersebut, DIY mempunyai hak untuk mengatur dan merancang daerahnya sedemikian rupa sesuai dengan keinginan Gubernur DIY selaku pemegang otoritas tertinggi. Hak istimewa yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikandung dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY meliputi Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, urusan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, urusan kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Program desa mandiri budaya merupakan salah satu contoh implementasi hak keistimewaan DIY.

Program Desa Mandiri Budaya merupakan sebuah kebijakan yang dirancang khusus oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di tempat-tempat tertinggal dengan cara memanfaatkan potensi-potensi yang ada di daerah tersebut. Potensi yang dimaksud adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di lingkup masyarakat tersebut. Pemerintah DIY percaya apabila sumber daya alam dan sumber daya manusia di setiap daerah dapat dikelola dengan baik maka akan memberikan efek positif terhadap masyarakat yang ada di daerah tersebut. Budaya lokal, baik itu dalam bentuk fisik maupun non-fisik menjadi senjata utama dalam program ini. Budaya lokal sebagai sumberdaya budaya merepresentasikan nilai-nilai budaya masyarakat yang tinggal di pedesaan secara khususnya. Dengan kebijakan ini Pemerintah berharap desa bersama dengan masyarakat bisa berkolaborasi untuk mengembangkan budaya lokal yang tersedia. Dengan begitu maka kebudayaan yang mereka miliki dapat membantu mereka untuk mencapai

kesejahteraan dalam bidang ekonomi maupun sosial-budaya. Pemerintah mendukung budaya-budaya lokal untuk berkembang sehingga masyarakat dapat hidup dari kebudayaan yang mereka miliki.

Sebelum lahirnya program desa mandiri budaya, Pemerintah DIY sudah terlebih dahulu memperkenalkan jenis-jenis desa yang bergerak di dalam pelestarian budaya sekaligus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui potensi-potensi kebudayaan yang mereka miliki. Jenis-jenis program tersebut dibagi menjadi beberapa strata yaitu pada strata terbawah ada desa kantong budaya, strata berikutnya rintisan budaya, desa budaya dan pada akhirnya barulah lahir program desa mandiri budaya yang kita kenal saat ini. Pembagian strata tersebut dilakukan dengan melihat kemampuan desa tersebut dalam melaksanakan program-program yang ada dan juga melihat potensi-potensi yang mereka miliki.

Hal yang membedakan antara strata desa di atas adalah hak dan kewajiban masing-masing. Secara keseluruhan semua desa diwajibkan untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang dimiliki. Untuk hak bagi desa kantong budaya adalah mendapatkan fasilitas dan pembinaan agar statusnya dapat meningkat menjadi desa rintisan budaya. Desa rintisan budaya juga memiliki hak yang sama, akan tetapi dengan meningkatnya status tersebut, desa rintisan budaya diwajibkan untuk mengadakan festival budaya bersama dengan desa rintisan lainnya. Desa budaya yang berada satu tingkat di atas, kembali dituntut dengan kewajiban yang lebih tinggi yaitu diwajibkan untuk mengadakan festival kebudayaan 35 hari sekali, bergiliran dengan desa budaya lainnya. Sedangkan untuk desa mandiri budaya sendiri untuk bisa mencapai status

ini, Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta harus memenuhi kriteria empat pilar desa mandiri budaya, yaitu desa budaya, desa wisata, desa prima dan desa preneur. Setelah Kalurahan dengan status kalurahan budaya dapat memenuhi kriteria tersebut maka dapat naik tingkat menjadi desa mandiri budaya.

Penelitian ini mengkaji tentang Otoritas Desa dalam Pengelolaan Dana Keistimewaan Desa Mandiri Budaya. Penelitian ini peneliti anggap penting karena program ini merupakan kebijakan yang outputnya memiliki dampak positif dan sangat berdampak bagi masyarakat. Program Desa Mandiri Budaya ini yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang ada di desa dengan cara memanfaatkan potensi-potensi budaya lokal yang ada di daerah tersebut. Potensi-potensi tersebut, baik fisik maupun non-fisik, merupakan kekayaan yang dimiliki oleh desa dan apabila dapat dikelola dengan maksimal maka akan berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Program ini menuntut adanya kerjasama antara dua belah pihak antara yang memimpin dan yang dipimpin. Maka dari itu penggunaan otoritas oleh pemerintah desa tidak dapat dilakukan sepihak karena seperti yang dikatakan di awal bahwa dibutuhkan kerja sama yang baik antara kedua belah pihak agar program desa mandiri budaya

Dalam implementasi program Desa Mandiri Budaya, ada satu aspek penting yang merupakan landasan dari keberhasilan suatu kekuasaan yaitu otoritas. Otoritas sendiri merupakan salah satu dari beberapa dimensi yang dikandung oleh teori *governability*. Alasan mengapa otoritas menjadi hal yang penting bagi peneliti di dalam kasus ini adalah karena kekuasaan/kepemimpinan tanpa adanya otoritas tidak akan bertahan lama. Otoritas merupakan kekuasaan yang sah dan diatur oleh Undang-undang. (SF. Marbun, 1996:28). Orang-orang

boleh saja berkuasa, tetapi tidak semua orang mempunyai keabsahan dalam kekuasaannya. Sebaliknya seseorang memang bisa saja memiliki otoritas, tetapi apabila tidak diikuti oleh kekuasaan yang kuat maka kepemimpinan tersebut dapat dikatakan cacat karena tidak berhasil mengakomodir seluruh bawahan/masyarakatnya.

Kooiman (1994), dalam jurnal pemekaran Daerah dan Persoalan Governability Lokal di Indonesia oleh Mardiyanto menjelaskan governability merupakan kemampuan dalam governing, akan tetapi Kooiman menjelaskan lebih detail bahwa *governability* adalah hasil dari keseimbangan antara governing needs dan governing capacities. Perspektif *governability* menganalisis hubungan saling ketergantungan antara pemerintah dan masyarakat. Peraturan dan aturan yang telah dibuat menjadi dasar dari pola tersebut. Regulasi memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk mengontrol dan mengatur segala sesuatu untuk meningkatkan produksi dan efisiensi masyarakat serta meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan sumber daya alam dan aset di suatu daerah, khususnya di Desa-desa.

Mengapa otoritas memiliki peran vital dalam berjalannya program Desa mandiri Budaya adalah karena program ini menuntut adanya kerjasama antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat, yang berarti antara Pemerintah Desa dan masyarakat harus memiliki visi yang sama. Bagaimana bisa program Desa Mandiri Budaya ini sukses apabila Pemerintah setempat tidak dianggap oleh masyarakatnya sendiri? Jika tidak ada kolektivitas antara kedua unsur tersebut maka program Desa Mandiri Budaya yang sukses hanya akan menjadi impian belaka. Pemerintah memang diberikan wewenang penuh untuk mengelola BKK

Dana Keistimewaan dari Pemerintah Daerah DIY. Otoritas yang diberikan kepada mereka memang pada akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Kerja sama yang baik antara dua belah pihak tersebut merupakan keharusan yang mesti dilakukan supaya apapun output yang diterima itu akan berdampak pada seluruh elemen masyarakat, baik masyarakat biasa maupun pemerintah.

Hal yang paling disorot dalam penelitian ini adalah bagaimana otoritas desa terhadap pengelolaan BKK Dana Keistimewaan Desa Mandiri Budaya. Pemerintah jelas memiliki otoritas dalam hal mengelola dana bantuan tersebut, namun partisipasi masyarakat juga tidak bisa diabaikan. Pemerintah harus memiliki kepercayaan yang tinggi dari masyarakat agar otoritas tersebut dapat berfungsi dengan baik. Maka dari itu kenapa pemerintah dan masyarakat harus satu visi dalam mengelola dana bantuan tersebut agar dana bantuan dapat terserap dengan baik dan berperan dalam kesejahteraan masyarakat desa. Kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada Pemerintah Desa harus selalu dipupuk, dapat dibayangkan jika pemerintah dan masyarakat mampu bersinergi dan bekerjasama dalam membangun daerahnya, niscaya mimpi untuk desa mandiri yang sesungguhnya akan terwujud. Masalahnya untuk saat ini masyarakat dan pemerintah terkadang sulit untuk bekerja sama. Entah itu dikarenakan minat partisipasi mereka yang rendah atau mungkin karena berbeda pandangan politik. Masalah tersebut dapat merusak desa dari dalam dan membuat desa sulit untuk berkembang.

Kalurahan Jerukwudel merupakan salah satu dari sekian desa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang beruntung bisa tergabung dalam program ini. Desa yang tergabung dalam program ini mendapatkan suntikan dana yang lumayan

besar berkisar sekitar 1 Milyar rupiah. Harapannya dengan suntikan dana tersebut Pemerintah Desa dapat menggunakannya untuk mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki. Misalnya mengembangkan tempat wisata, memberdayakan masyarakat serta mengembangkan budaya-budaya lokal, termasuk kuliner dan potensi-potensi non-fisik lainnya. Kalurahan Jerukwudel memiliki banyak potensi baik itu fisik maupun non-fisik. Salah satu potensi fisik adalah beberapa telaga. Kalurahan Jerukwudel memiliki beberapa telaga yang memiliki potensi untuk bisa menjadi tempat wisata. Contohnya yang sekarang sedang dikembangkan oleh Pemerintah adalah Embung Ngrancah. Embung ini diproyeksikan menjadi tempat wisata penghasil uang di masa depan, sehingga sosial-ekonomi masyarakat dapat terbantu baik itu melalui UMKM maupun jasa. Selain potensi fisik, juga ada potensi non-fisik yaitu seperti kuliner tradisional, pagelaran seni budaya dan Batik khas Jerukwudel. Masyarakat Jerukwudel secara keseluruhan masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Contohnya ketika ada acara pagelaran seni budaya seperti Rasulan atau Jathilan maka hampir semua elemen masyarakat akan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Selain itu juga di momen seperti ini maka kuliner yang akan disajikan juga merupakan kuliner khas tradisional masyarakat setempat sebagai salah satu cara untuk mempromosikan kuliner tradisional yang mereka miliki. Bandrek, Gethuk, Keripik Batang Pisang, Nasi Liwet dan berbagai kuliner tradisional lainnya.

Kalurahan Jerukwudel sendiri mendapatkan status sebagai Desa Mandiri Budaya di akhir tahun 2021 yang menandakan bahwa mereka masih terhitung baru berpartisipasi pada program ini. Tidak mudah bagi sebuah Desa/komunitas untuk memulai sesuatu yang baru meskipun dengan fasilitas yang memumpuni.

Tantangan sesungguhnya adalah beradaptasi dengan hal baru, baik itu Pemerintah Desa maupun masyarakat. Oleh karena itu sungguh kerjasama dan kesepahaman merupakan kunci utama. Kekuatan yang besar melahirkan tanggung jawab yang besar pula. Kalimat tersebut sangat pas untuk mendeskripsikan posisi sebuah Desa berstatus Mandiri Budaya. Desa Mandiri Budaya memiliki privilege untuk mengelola dana yang lebih banyak daripada Desa lainnya. Meskipun begitu, dana bantuan tersebut harus dapat dikelola dengan baik dan memiliki bobot tanggung jawab yang begitu besar. Pemerintah Desa harus memutar otak agar pengelolaan bantuan dana tersebut dapat tersalurkan dengan benar dan bermanfaat. Mengingat bahwa Desa ini baru merintis, maka keselarasan visi dan pemikiran antara pemerintah sebagai pemegang otoritas dan masyarakat harus menjadi hal yang utama.

Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk mengelola dana BKK Dana Keistimewaan tersebut sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Namun tentu saja salah satu hal yang paling penting adalah partisipasi masyarakat. Hubungan *symbiosis mutualisme* antara Pemerintah dan masyarakat merupakan aspek penting dalam pelaksanaan kewenangan. Memang Pemerintah Desa yang memiliki kewenangan untuk merancang dan mengatur anggaran BKK Dana keistimewaan tersebut, contohnya penyusunan masterplan untuk wisata tradisional *home stay* di Padukuhan Pudak yang nantinya akan mengusung konsep kehidupan bermasyarakat. Wisatawan nantinya akan diajak untuk hidup bersama-sama dengan masyarakat dan melakukan aktivitas yang sama dengan mereka. Selain itu juga ada pengembangan Embung Ngrancah yang akan dijadikan tempat wisata dan pasar bagi UMKM Jerukwudel. Pemerintah memiliki kewenangan untuk

merancang apapun itu untuk mengelola BKK Dana Keistimewaan. Akan tetapi, tetap saja kewenangan tersebut harus sesuai dengan tujuan dihibahkannya BKK Dana Keistimewaan kepada mereka.

Berdasarkan uraian di atas maka menurut peneliti diperlukan adanya rasa hormat satu sama lain antara Pemerintah Desa sebagai pemegang otoritas dan Masyarakat sebagai pelaksana dalam mengelola BKK Dana Keistimewaan. Apabila tidak ada kesepahaman dan kerjasama antara kedua belah pihak tersebut maka tidak akan ada tujuan yang tercapai. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai bagaimana penggunaan otoritas desa dalam mengelola BKK Dana Keistimewaan menurut pandangan masyarakat dengan mengambil judul penelitian “Kewenangan Desa dalam Pengelolaan Dana Keistimewaan Desa Mandiri Budaya di Kalurahan Jerukwudel, Kapanewon Girisubo, Kabupaten GunungKidul.”

B. Rumusan Masalah

Mengacu kepada uraian-uraian di latar belakang di atas maka dapat peneliti sampaikan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini ialah “Bagaimana Otoritas Desa dalam pengelolaan Dana Keistimewaan Desa Mandiri Budaya di Kalurahan Jerukwudel, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta?”

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sehingga tidak keluar dari jalur yang ingin diteliti dan juga membatasi penelitian

supaya dapat membatasi data yang penting dan yang tidak (Moleong, 2010).

Maka, penelitian peneliti fokuskan pada:

- a. Hak Pemerintah Desa dalam pengelolaan BKK Dana Keistimewaan.
- b. Kebijakan Pemerintah Desa pengelolaan BKK Dana Keistimewaan.
- c. Kesesuaian Penggunaan BKK Dana Keistimewaan Mandiri Budaya.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang teridentifikasi, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Otoritas Desa dalam Pengelolaan Dana Keistimewaan Desa Mandiri Budaya di Kalurahan Jerukwudel, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini peneliti harapkan dapat bermanfaat dalam bidang akademis maupun memberikan manfaat praktis.

a. Manfaat Akademis

Semoga dapat menjadi acuan dalam menambah referensi kaum intelektual terutama dalam memperoleh gelar sarjana di Kampus STPMD “APMD” Yogyakarta, berkaitan dengan Otoritas Desa dalam Pengelolaan Dana Keistimewaan Desa Mandiri Budaya di Kalurahan Jerukwudel dan menjadi bahan studi lanjut bagi pihak-pihak yang ingin mendalami lebih

jauh tentang permasalahan yang berkaitan dengan fokus permasalahan saat ini.

b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pencerahan terhadap Masyarakat tentang pengelolaan dana kesetimewaan yang benar dan tepat sasaran sekaligus memperoleh pengetahuan empirik bagi Pemerintah Desa tentang pentingnya Otoritas Desa dalam pengelolaan Dana Keistimewaan Desa Mandiri Budaya.

F. Literature Review

Berdasarkan jurnal yang digarap oleh Fajrina Risanti dan Fransisca Winarni (*Journal of Public Policy and Administration Research Volume 7, Nomor 3 Tahun 2018*) dengan judul *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Kalurahan Wisata Wukirsari Di Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul membahas mengapa pengembangan Kalurahan wisata Wukirsari belum terlayani dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya peraturan formal yang mengatur kerja sama yang dilakukan, kurangnya dana dan sumber daya manusia, kurangnya fasilitas infrastruktur untuk Desa wisata, dan kurangnya kepercayaan di antara beberapa pihak yang ikut dalam pembentukan Desa wisata. Beberapa faktor yang menghambat perkembangan Desa wisata tersebut berasal dari faktor budaya masyarakat setempat yang melihat sektor wisata adalah hal yang negatif. Selain itu juga faktor institusi yang membuat ketergantungan Desa wisata terhadap dinas terkait dan swasta yang mendanai. Selanjutnya faktor yang menghambat adalah tidak adanya regenerasi pengurus yang pada akhirnya

menyebabkan sumber daya manusia yang tidak mencukupi baik jumlah maupun kemampuan (Risanti, 2018). (<https://journal.student.uny.ac.id/12670/12211>)

Menurut Jurnal yang ditulis Anak Agung Istri Andriyani dkk, (Jurnal Ketahanan Nasional Volume 23 Nomor 1, Tahun 2017)) yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali) menguraikan tiga tahap proses pemberdayaan masyarakat yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan pemberdayaan di mana masyarakat Desa Wisata Penglipuran akan diberdayakan agar menciptakan sumber daya manusia yang kuat secara sosial maupun ekonomi. Pemerintah diharapkan dapat berperan lebih kuat sebagai salah satu pemangku kepentingan wisata, khususnya dalam hal peningkatan sumber daya manusia yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Pengelola meminta masyarakat untuk menjaga kebersihan, ketertiban, daya tarik estetika, kenyamanan, dan keamanan lingkungan serta dalam hal promosi agar pada saat promosi dilaksanakan lingkungan sekitar tempat wisata dapat terlihat lebih baik dan dapat menarik banyak wisatawan untuk ingin berkunjung tempat wisata yang mereka kelola (Andriyani, dkk 2017). (journal.ugm.ac.id/jkn/article/viewFile/18006/15758)

Menurut Jurnal yang ditulis oleh Rizky Purna Aji Galih Pangestu dkk (Jurnal Publika Volume 4 Nomor 10 Tahun 2016) yang berjudul Upaya Pengembangan Desa Wisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi pada Kalurahan Wisata Bejiharjo Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul), medeskripsikan tentang Upaya Pemdes dalam pengembangan wisata di Kalurahan Bejiharjo sebagai cara untuk meningkatkan PADes. Tapi tentu saja akan ada

beberapa permasalahan yang harus dihadapi, seperti belum adanya kesepakatan anggaran yang dibuat yang mempengaruhi Pemerintah Kalurahan sehingga berakibat pada ketidakpastian tentang pelepasan dana untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas wisata; Pendapatan pengelola resmi Kalurahan Wisata Bejiharjo tidak bisa maksimal karena banyaknya pengelola objek wisata yang belum berpartisipasi secara formal dalam pengelolaan Kalurahan Wisata Bejiharjo, dan sebagainya. (Pangestu, 2016)

(ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/1209)

Penelitian Nikita Amalia dkk dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Serta Dampaknya Terhadap Perekonomian Warga Di Desa Tulungrejo Kota Batu (Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Volume 61 Nomor 3 Tahun 2018). Temuan menunjukkan keragaman daya tarik wisata Desa Tulungrejo, yang meliputi wisata alam, wisata buatan manusia, agrowisata, wisata sejarah, dan wisata religi. Sebagian besar warga Desa Tulungrejo telah terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata dan siap untuk bekerja di sektor ini. Penduduk Desa Tulungrejo mengambil bagian dalam berbagai kegiatan. Pembangunan Desa Wisata Tulungrejo memperluas peluang ekonomi daerah tersebut. pertumbuhan harga apel, penciptaan lapangan kerja baru, dan peningkatan pendapatan bagi petani. Mengacu kepada hasil temuan, peneliti menyarankan solusi kepada Kelompok Sadar Wisata Desa Tulungrejo untuk mencoba merangkul kembali masyarakat yang belum ikut berpartisipasi, misalnya dengan mengadakan acara yang bernuansa adat Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat di dalamnya setelah itu acara tersebut dipromosikan lebih luas

sehingga menjadi suatu atraksi wisata dan menarik minat wisatawan (VGA, Kusumawati, & Hakim, 2018).

(administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2597)

Penelitian Skripsi Defariza Shidiq Pradana (2022) dengan judul Skripsi Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Desa Mandiri Budaya di Kalurahan Wisata Bejiharjo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul. Menemukan temuan bahwa pengelolaan Desa wisata berbasis Desa Mandiri Budaya Kalurahan Bejiharjo melibatkan berbagai pihak dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam pengelolaan tersebut, pemerintah menjalankan fungsinya berperan sebagai pengawas jalannya setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Kekuasaan penuh diberikan kepada Pemerintah Kalurahan dalam hal pengembangan pariwisata di Kalurahan Bejiharjo. Partisipasi swasta dalam hal ini adalah dengan memberikan bantuan berupa dana yang terbatas. Peran pemerintah dalam mengawasi berjalannya kegiatan dinilai cukup baik, dibuktikan dengan hadirnya pemerintah di dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Akan tetapi masalah yang saat ini mereka hadapi adalah kehadiran masyarakat lokal yang tidak satu visi dengan pengelola tempat wisata. Mereka menawarkan jasa *tour guide* kepada wisatawan dengan harga yang tidak sesuai dengan kesepakatan dengan pengelola sehingga merusak harga tersebut. Masyarakat lokal tersebut mendirikan stan serta baliho di beberapa titik sebelum menuju Kawasan Kalurahan Wisata Bejiharjo dengan harapan dapat menarik minat wisatawan untuk menggunakan jasa mereka. Dengan adanya masyarakat lokal tersebut menimbulkan adanya persaingan dalam segi harga yang tidak sehat. (<https://etd.umy.ac.id/id/eprint/34226>)

Menurut penelitian Nugrahani Kusumastuti (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan Volume 2 Nomor 1 Tahun 2018) yang berjudul Strategi Mempercepat Pembangunan Desa Mandiri: Studi di Kalurahan Kemadang Gunungkidul. Menyandang predikat desa mandiri adalah kebanggaan tersendiri bagi Kalurahan Kemadang. Pencapaian ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan, yang tercermin dari rencana yang telah dilaksanakan dan dapat dikatakan berhasil karena dapat menyebabkan Kalurahan Kemadang menjadi satu-satunya desa otonom di Gunungkidul. Kesuksesan tersebut bisa kita lihat apabila mengacu kepada karakteristik Desa mandiri berdasarkan permenDesa NO. 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (IDM). Namun, masih ada diperlukan untuk meningkatkan infrastruktur dan fasilitas di sejumlah industri agar lebih mudah bagi masyarakat untuk mengakses layanan. Salah satu contohnya adalah kewajiban bagi tenaga kesehatan untuk memastikan kelengkapan pelayanan fasilitas yang ada. Melanjutkan pendidikan atau pelatihan terkait keterampilan juga penting untuk mendapatkan supaya mendapatkan akses ke pendidikan nonformal. Selain itu, karena tidak ada kantor pos di Kalurahan Kemadang, maka penting untuk didirikan atau dibangun untuk meningkatkan segi distribusi. Saat melakukan sensus penduduk, sebaiknya dilakukan lebih sering dan teliti saat memasukkan data atau membuat laporan. Hal ini dilakukan untuk mempercepat perluasan pembangunan Kalurahan Kemadang.

(<https://doi.org/10.14421/jpm.2018.021-09>)

Berdasarkan uraian-uraian penelitian, jurnal maupun buku yang ada di uraian di atas, letak persamaan penelitian kali ini adalah sama-sama membahas

tentang pengelolaan dan pengembangan sebuah desa yang mencoba untuk berkembang dan menjadi maju melalui pengembangan potensi baik itu fisik dan non fisik yang mereka miliki. Sedangkan letak perbedaannya adalah objek penelitiannya. Penelitian kali ini akan lebih fokus membahas tentang otoritas desa dalam menjalankan Pemerintahannya yang mana belum pernah dibahas sebelumnya di penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini lebih mengkaji terhadap otoritas Kalurahan dan melihat apakah penggunaan hak-hak yang dimiliki sudah sesuai dan BKK Dana Keistimewaan yang dikelola oleh mereka sudah sesuai dengan alasan dihibahkannya dana itu kepada mereka. Penelitian ini pula menggunakan perspektif *governability* dalam pelaksanaannya. Perspektif ini sendiri memiliki sudut pandang yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yaitu meneliti tentang otoritas desa dalam pengelolaan Dana Keistimewaan Desa Mandiri Budaya di Kalurahan Jerukwudel.

G. Kerangka Konseptual

a. Otoritas/Kewenangan Desa

Robert M Maclever “*The Modern State*” dalam buku (Prof.Dr Soerjono Soekanto, ‘sosiologi suatu pengantar’ 2015:240) Wewenang adalah suatu hak yang telah untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah penting dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan. Dapat dikatakan yang mempunyai wewenang adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab dalam memimpin banyak orang. Peneiliti menganggap kewenangan sendiri berasal dari pemberian mandat dari atasan kepada orang-orang yang mereka anggap sanggup untuk bertanggung jawab dalam menjalankan

tugasnya dan bisa juga terjadi sebaliknya. Kewenangan tidak semena-mena dapat diakui oleh dirinya sendiri tanpa ada persetujuan orang lain jika berbicara menyangkut kepentingan orang banyak. Seseorang dapat dikatakan berkewenangan karena dia sudah diberikan kepercayaan oleh orang banyak dan dianggap memiliki kemampuan untuk menjalankannya.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan atau hak kepada Desa untuk bisa mengurus sendiri rumah tangga pemerintahan mereka setelah sebelumnya Desa sangat bergantung dengan Pemerintah daerah. Indonesia merupakan negara yang sangat plural. Pluralisme tersebut merupakan pedang dua sisi yang memiliki sisi positif dan negatif bagi bangsa kita. Perbedaan tersebut adalah salah satu dasar kenapa Desa diberikan wewenang baru untuk mengurus tatanan pemerintahannya sendiri. Pemerintah pusat memberikan kebebasan agar Desa bisa berkembang dan bertumbuh sesuai dengan kultur atau budaya istiadat setempat. Karena apabila tetap menganut sistem sentralisasi dan Desa harus bergantung kepada pemerintah pusat dan daerah, ditakutkan program atau kebijakan yang mereka buat tidak sesuai dengan kebutuhan Desa itu.

M.Salahudin (2015) berpendapat bahwa, menempatkan desa sebagai organisasi campuran (*hybird*) antara masyarakat berpemerintahan (*self governing community*) dengan pemerintahan lokal (*local self goverment*) yang berarti bahwa pemerintah desa sendiri tercipta karena adanya partisipasi dan oleh karena itu kewenangan yang dimiliki oleh desa juga mengikuti kebiasaan masyarakat setempat. Masyarakat memiliki kewenangan untuk ikut mengelola dan mengatur desa. Jadi, desa bukan hanya Pemerintah Desa dan Kepala Desa saja tetapi seluruh masyarakat juga. Menurut peneliti pendapat Salahudin menyatakan bahwa desa itu bukan hanya dikuasai oleh segelintir orang yang duduk di pemerintahan tetapi desa adalah hasil dari seluruh elemen yang menyatu antara masyarakat dan pemerintah. Organisasi macam ini membutuhkan partisipasi yang aktif dari kedua belah pihak agar organisasi dapat berjalan lancar. Apabila salah satunya tidak ikut berpartisipasi maka penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dapat berjalan dengan baik

Kewenangan desa sebenarnya adalah wujud implementasi dari otonomi desa. Menurut Zudan Arif (2018), kekhasan otonomi desa, minimal dapat ditinjau dari dua aspek. Pertama, meskipun pemerintah desa dianggap sebagai unit terkecil dari pemerintahan nasional, namun tetap akan diatur juga masalah keuangan serta hubungan pembinaan dan pengawasan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Meskipun diberi otonomi untuk mengurus rumah tangganya sendiri, bukan berarti pemerintah pusat dan daerah akan membiarkan desa berjalan sendiri tanpa ada pengawasan. Kedua, otonomi desa yang didasarkan pada hak-hak yang

berasal dari adat setempat, sehingga lebih bermakna sebagai kebebasan Masyarakat desa untuk mengelola kepentingan bersama sejalan dengan sistem nilai sosial budaya daerah mereka, meskipun implementasinya mengharuskan penggunaan administrasi yang lebih maju. Otonomi bukan berarti memberikan kewenangan sepenuhnya kepada desa tetapi memberikan setiap desa yang memiliki keberagaman kehidupan sosial dan budaya untuk mengurus desa mereka sesuai dengan adat dan kebiasaan yang mereka miliki.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan titik awal bagi desa untuk menyusun kembali hak-hak yang dimiliki desa. Kewenangan tersebut dipertegas dengan lahirnya Permendesa Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Dengan lahirnya peraturan ini maka dapat memberi kesempatan bagi desa untuk menentukan nasibnya sendiri. Mereka diberikan kebebasan untuk merencanakan sendiri hal-hal yang mereka butuhkan bahkan dalam pelaksanaannya dan sampai ke tahap evaluasi mereka dibebaskan untuk dapat mencari sendiri solusi yang kira-kira mereka butuhkan untuk kemajuan desa. Dalam peraturan tersebut desa diberikan kebebasan untuk mengatur program apa yang terbaik untuk mereka sesuai dengan hukum adat setempat dan kehidupan sehari-hari mereka. Sebelumnya seluruh desa di Indonesia mengikuti komando dari pusat untuk masalah pembangunan. Hal ini menyebabkan program tersebut bisa saja tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat di beberapa daerah dikarenakan perbedaan budaya dan kebutuhan. Perbedaan ini pada

akhirnya membuat program yang sebenarnya bagus tetapi hanya karena tidak sesuai dengan kebutuhannya membuat program tersebut berakhir gagal untuk sebagian daerah.

Kemampuan dan hak seseorang untuk melakukan suatu tindakan, membuat pilihan, atau mengarahkan masyarakat dapat dipahami sebagai otoritas. Karena kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu, sementara otoritas lebih tentang hak untuk melakukan sesuatu, otoritas itu sendiri berbeda dari kekuasaan. (Sutoro Eko,2014). Otoritas lebih mengacu kepada apa saja yang boleh dilakukan oleh seseorang, hak-hak apa saja yang boleh dia lakukan, sedangkan kekuasaan lebih kepada kemampuan orang tersebut dalam menjalankan kekuasaan yang dia terima. Kedua hal ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya karena keduanya adalah suatu kesatuan dalam menjalankan sebuah pemerintahan. Kewenangan mengatur alur yang harus dijalani sedangkan kekuasaan merupakan kemampuan seseorang untuk menjalani jalan tersebut. Adapun kewenangan yang diberikan kepada Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan pada dasarnya ada tiga kewenangan yaitu:

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul

Kewenangan model ini merupakan jenis kewenangan yang didapatkan secara turun-temurun yang berarti kewenangan ini adalah kewenangan yang sudah ada sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga saat ini. Kewenangan jenis ini memiliki keunikan dikarenakan kemungkinan

warisan di setiap daerah akan berbeda-beda. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul meliputi:

- a) penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
- b) pranata hukum adat;
- c) pemilikan hak tradisional;
- d) pengelolaan tanah kas desa adat;
- e) pengelolaan tanah ulayat;
- f) kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat;
- g) pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat;
- h) dan masa jabatan kepala desa adat.

2) Kewenangan lokal berskala desa

Kewenangan ini adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat desa. Kewenangan model ini lebih focus kepada tata Kelola pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap masyarakat. Tidak hanya itu, kewenangan ini memberikan hak untuk melakukan inovasi dan terobosan selama itu dapat berdampak baik terhadap masyarakat banyak. Kewenangan ini bentuknya adalah:

- a) Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;

- b) Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c) Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat desa; kegiatan yang telah dijalankan oleh desa atas dasar prakarsa desa;
- d) Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh desa; dan
- e) Kewenangan lokal berskala desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

3) Kewenangan oleh Pemerintah

Kewenangan ini adalah kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini didapat oleh pemerintah Desa dari pemerintah yang statusnya lebih tinggi. Kewenangan ini biasanya diberikan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Pemerintah daerah maupun pusat.

Dari tiga macam kewenangan yang dapat kita baca diatas, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis kewenangan yang ada tersebut memiliki dasar dan sumber yang berbeda-beda. Pertama, kewenangan berdasarkan asal usul. Kewenangan model ini merupakan kewenangan yang sudah turun-temurun sejak

dahulu yang menyesuaikan dengan kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Misalnya mengatur tentang hukum-hukum adat yang tidak diatur dalam Undang-Undang. Mengatur tentang kepemilikan tradisional dan mengatur tentang hal-hal yang sesuai dengan adat istiadat desa tersebut bahkan jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Kedua, adalah kewenangan lokal di skala desa. Kewenangan ini lebih focus terhadap kewenangan untuk mengatur dan melayani seluruh masyarakat yang ada di desa. Misalnya kewenangan untuk dapat memberikan pelayanan dan pemberdayaan yang baik untuk masyarakat, kewenangan yang memiliki hak untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang dapat berdampak bagi internal desa, juga kewenangan yang berhubungan dengan memastikan ketersediaan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat desanya. Ketiga, kewenangan ini merupakan kewenangan yang didapat atau ditugaskan langsung oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti berpendapat bahwa Pemerintah Desa wajib mempunyai pengetahuan tentang kewenangannya. Tanpa pengetahuan tentang kewenangan maka Pemerintah Desa/kalurahan akan kesulitan untuk merancang undang-undang dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan fungsi. Kewenangan sendiri diberikan kepada seseorang dikarenakan dia dianggap mampu dan sanggup untuk menjalankan kewajibannya memimpin orang banyak dan memutuskan sesuatu. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Desa kepada pemerintah Desa merupakan salah satu sumber untuk bisa mendapatkan kewenangan atau otoritas dalam memutuskan sesuatu atau membuat kebijakan. Penggunaan otoritas tersebut adalah jalan awal menuju kesuksesan sebuah Desa,

apabila pemimpin mereka memilih jalan yang salah maka akan berakibat kepada hasil akhir yang bisa saja buruk.

Peneliti juga berpendapat bahwa kewenangan yang didapat oleh pemerintah bisa bermacam-macam tergantung kepada siapa dan untuk apa kewenangan tersebut diberikan. Macam-macam kewenangan tersebut diatur langsung oleh pemberi kewenangan yaitu pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Maksud kenapa kewenangan tersebut diatur adalah supaya dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan diberikan kewenangan tersebut.

c. Pengelolaan Keuangan Desa

a) Pengertian Pengelolaan

Istilah pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Menurut George R Terry (2008) Manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, kegiatan ini dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upaya terbaiknya melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Mengetahui apa yang harus dicapai, mencari tahu bagaimana melakukannya, memahami bagaimana melakukannya, dan mengukur keberhasilan upaya mereka semuanya termasuk ke dalam manajemen termasuk juga membangun dan memelihara lingkungan yang menawarkan kontribusi dan kontrol ekonomi, psikologis, sosial, politik, dan teknologi.

PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 BAB 1 Pasal 1, mengatakan keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat

dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa keuangan desa adalah segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.

Dalam PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 BAB 1 Pasal 1, juga turut menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam mengelola keuangan desa, Kepala Desa dibantu oleh jajaran pelaksana yang terdiri dari keseluruhan Perangkat Desa, yaitu Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan juga Kepala Seksi.

Berdasarkan penjelasan tentang pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa tahapan dan tugas manajemen secara umum adalah perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.:

1. Perencanaan (*Planning*)

Ketika kita ingin melakukan pekerjaan dengan baik maka dibutuhkan rancangan pemikiran yang baik pula supaya hasilnya dapat optimal. Perencanaan sangat menentukan apa yang akan terjadi kegiatan sudah dalam tahap pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan adalah langkah awal di dalam sebuah pekerjaan organisasi. Melihat pendapat di atas dapat kita pahami bahwa perencanaan merupakan salah satu pilar penting bagi sebuah desa, umumnya perencanaan keuangan desa dilakukan

setelah tersusunnya RPJMDes sebagai dasar untuk menyusun APBDDes. Perencanaan yang baik dan matang dapat menjadikan pelaksanaan aktivitas lainnya menjadi berjalan sesuai dengan kemauan dari impian mewujudkan desa yang maju.

2. Pelaksanaan (*actuating*)

Setelah melewati beberapa rangkaian perencanaan maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah pelaksanaan. Tahap pelaksanaan adalah inti dari segala macam kegiatan. Tahap ini merupakan hasil dari perencanaan yang sudah dilakukan. Maka sebagian besar hasil dari pelaksanaan ini harusnya adalah hasil dari perencanaan di awal. Pemerintah Desa melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam APBDesa.

3. Penatausahaan.

Penatausahaan keuangan desa ialah kegiatan mengatur keuangan desa dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan dan asas akuntabel. Kegiatan dalam tahap ini meliputi semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas yang disertai dengan dokumen pendukung seperti buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank desa.

Penatausahaan keuangan desa dalam PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut ini :

- a) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

- b) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- c) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- d) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

4. Pelaporan Keuangan Desa

Pelaporan keuangan desa merupakan kewajiban Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah dan merupakan tahap akhir dalam serangkaian proses pengelolaan keuangan desa. Laporan yang disampaikan adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDes. Berdasarkan PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota, berupa.

- a) Laporan Semester Pertama

Laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes. Laporan ini paling lambat diserahkan pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

- b) Laporan Semester Akhir Tahun

Laporan semester akhir tahun sama seperti sebelumnya yaitu merupakan realisasi pelaksanaan APBDes dan paling lambat disampaikan pada akhir bulan Januari pada tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Kegiatan pertanggungjawaban ini merupakan kegiatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes, dilampiri :

- a) format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
- b) format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- c) format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes harus diinformasikan kepada Masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat.

Menurut uraian tentang pengelolaan keuangan desa di atas, perencanaan adalah tahap awal dari suatu kegiatan pengelolaan/manajemen yang keberadaannya sangat penting untuk memberikan arah atau standar kinerja dalam pelaksanaan. Dalam mewujudkan sebuah desa yang maju, maka kemampuan dalam merancang kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan agar masyarakat dapat sejahtera sangatlah dibutuhkan. Selanjutnya hal yang tidak kalah krusial adalah melaksanakan seluruh rangkaian yang sudah direncanakan. Sembari pelaksanaan

dilakukan penatausahaan dilakukan dengan mencatat keluar dan masuknya anggaran yang sudah terpakai. Selanjutnya diwajibkan untuk melakukan pelaporan realisasi kepada Bupati yang dibagi menjadi dua semester. Laporan dilakukan supaya Bupati dapat melakukan pengendalian jalannya program di setiap desa. Pada tahap akhir laporan pertanggungjawaban oleh Kepala Desa kepada Bupati tentang realisasi APBDes pada tahun anggaran tersebut.

d. Pengelolaan Dana Keistimewaan

Anggaran keuangan termasuk pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintahan, harus dikelola dengan baik secara seimbang dan dinamis. Anggaran baiknya diseimbangkan dan dioptimalkan, semua pengeluaran baik reguler maupun pengembangan harus selalu sama dengan total yang diterima. Karena begitu krusialnya masalah pendanaan ini, untuk mengatur pengelolaan tersebut pemerintah mengeluarkan UU NO 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang isinya mengatur tentang tata cara mengelola keuangan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban dan pengawasan.

Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan yang selanjutnya disebut BKK Dana Keistimewaan adalah bantuan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Kalurahan dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung, bersumber dari Dana Keistimewaan untuk mendukung pencapaian target kinerja urusan keistimewaan melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan/atau anggaran pendapatan dan belanja desa.

Berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan BKK dana keistimewaan DIY, Pemerintah Daerah DIY membuat Peraturan Gubernur No 100 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan bantuan keuangan khusus dana keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa dana keistimewaan adalah dana yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan belanja transfer pada bagian transfer lainnya. Selanjutnya dijelaskan pula mengenai Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan yang selanjutnya disebut BKK Dana Keistimewaan adalah bantuan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Kalurahan, dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja transfer, yang bersumber dari Dana Keistimewaan untuk mendukung pencapaian target kinerja urusan keistimewaan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pemberian BKK Dana Keistimewaan kepada pihak Pemerintah Desa diperuntukkan untuk melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan potensi masyarakat baik budaya maupun alam di tingkat Desa. Selain itu BKK Dana Keistimewaan juga dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan percepatan pelaksanaan kebijakan strategis Gubernur dalam Urusan Keistimewaan yang didalamnya termasuk kegiatan tentang kebudayaan.

Berdasarkan uraian di atas, menyatakan bahwa pengelolaan Dana Keistimewaan difokuskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat DIY secara signifikan. Selain itu, BKK Dana Keistimewaan tersebut juga disalurkan kepada Pemerintah Desa

untuk memberdayakan masyarakatnya dengan tetap menjaga nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta. Oleh karena itu pemerintah desa diberikan wewenang untuk mengelola BKK Dana Keistimewaan tersebut agar kiranya dapat membangun ekonomi masyarakat sekaligus mengembangkan potensi alam, pariwisata serta nilai-nilai budaya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa-Desa penerima BKK Dana Keistimewaan rata-rata memang memiliki keunggulan dibandingkan dengan Desa lainnya. Mereka memiliki kualifikasi yang memumpuni, contohnya adalah memiliki budaya yang dapat dikembangkan, pemberdayaan perempuan, memiliki ekonomi lokal yang cukup kuat serta memiliki potensi wisata. Desa-Desa yang memiliki karakteristik tersebut diberikan keistimewaan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengingat mereka memiliki potensi untuk bisa menjadi Desa yang maju. Dengan adanya bantuan tersebut maka diharapkan mereka dapat mencapai kesejahteraan yang mereka impikan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur No 100 Tahun 2020, dijelaskan mengenai pengelolaan BKK Dana Keistimewaan yang mana sebagai berikut :

a) Perencanaan

Perencanaan program dan kegiatan Urusan Keistimewaan di Pemerintah Kalurahan disusun dengan memperhatikan nomenklatur program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Perencanaan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan Urusan Keistimewaan untuk BKK Dana Keistimewaan dilaksanakan secara partisipatif oleh Pemerintah Kalurahan bersama pihak terkait yaitu Badan Permusyawaratan Kalurahan. Lurah menyampaikan usulan rencana program dan kegiatan

serta kebutuhan pendanaan Urusan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah pengampu kebijakan strategis Gubernur, dengan diketahui oleh Panewu dan Bupati. Penyampaian usulan rencana program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan Urusan Keistimewaan dilengkapi dengan kerangka acuan kerja dan rencana kerja anggaran. Panaradya Kaistimewaan bersama dengan Perangkat Daerah pengampu kebijakan strategis Gubernur akan melakukan pencermatan, pembahasan, dan sinkronisasi terhadap usulan program tersebut.

b) Pelaksanaan.

Pemerintah Kalurahan penerima BKK Dana Keistimewaan mengajukan surat permohonan pencairan kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan keuangan daerah. Surat permohonan dokumen sebagai berikut:

1. kerangka acuan kerja kegiatan dan dokumen rincian rencana penggunaan dana;
2. surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan dana;
3. fotokopi kartu identitas penanggung jawab penerima BKK Dana Keistimewaan;
4. fotokopi rekening kas umum Pemerintah Kalurahan; dan
5. bukti pengeluaran kas, dengan meterai cukup yang telah ditandatangani,

Tahapan penyaluran BKK Dana Keistimewaan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan sebagai berikut:

1. tahap kesatu ditransfer paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah alokasi BKK Dana Keistimewaan paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan April; dan
2. tahap kedua ditransfer sebesar selisih dana yang telah ditransfer di tahap pertama sesuai dengan rencana kebutuhan riil dana dari jumlah alokasi BKK Dana Keistimewaan paling cepat bulan Juli dan paling lambat bulan September setelah disampaikan laporan realisasi keuangan dan laporan realisasi capaian kinerja tahap kesatu paling kurang 80% (delapan puluh persen).

Permohonan pencairan tahapan didahului dengan penyampaian:

1. laporan realisasi keuangan; dan
2. laporan realisasi capaian kinerja, yang diajukan secara bersamaan.

c) Pelaporan

Pemerintah Kalurahan penerima BKK Dana Keistimewaan yang disalurkan langsung dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BKK Dana Keistimewaan kepada Gubernur melalui Paniradya Pati, dengan tembusan kepada:

1. Bupati;
2. Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan keuangan daerah; dan
3. Kepala Perangkat Daerah pengampu kebijakan strategis Gubernur.

Laporan pertanggungjawaban tersebut dapat disampaikan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat pada tanggal 20 (dua

puluh) Desember tahun berjalan, untuk BKK Dana Keistimewaan yang disalurkan pada akhir tahun dan/atau perubahan anggaran. Laporan pertanggungjawaban diserahkan dengan format sebagai berikut:

1. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan/penggunaan dana BKK Dana Keistimewaan;
2. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BKK Dana Keistimewaan;
3. Realisasi fisik dan keuangan, yang berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rincian anggaran biaya BKK Dana Keistimewaan yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah;
4. untuk disampaikan oleh penerima dana BKK Dana Keistimewaan terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk permasalahan yang dihadapi dan solusi untuk mengatasi permasalahan; dan
5. lampiran, berupa laporan penggunaan dana.

d) Pengendalian

Bupati dan Perangkat Daerah pengampu kebijakan strategis Gubernur melakukan pengendalian terhadap penggunaan BKK Dana Keistimewaan. Hasil Pengendalian disampaikan kepada Gubernur melalui Panaradya Pati. Berdasarkan hasil pengendalian Panaradya Pati dapat

melakukan kunjungan lapangan atau berkoordinasi dengan Perangkat Daerah pengampu kebijakan strategis Gubernur dan Pemerintah Kabupaten.

e) Perubahan Penggunaan Dana dan Sisa Dana

Apabila Pemerintah Kalurahan penerima BKK Dana Keistimewaan akan melakukan perubahan penggunaan BKK Dana Keistimewaan, Pemerintah Kalurahan harus mengajukan revisi penggunaan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Bupati. BKK Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan yang belum disalurkan ke rekening Kalurahan sampai dengan akhir tahun anggaran tidak dapat dijadikan penambah pagu anggaran BKK Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan tahun anggaran berikutnya. Dan apabila terdapat sisa dana penggunaan maka dana sisa tersebut akan disetorkan ke rekening kas umum DIY.

Menurut penjelasan di atas Kalurahan/desa yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta berada di dalam dua ranah hukum yang berbeda. Selain mengacu kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, Desa/Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengikuti peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pengelolaan BKK Dana Keistimewaan Kalurahan Mandiri Budaya, tata cara pengelolaan dana bantuan khusus ini sedikit berbeda dengan yang tertulis di PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014.

Dalam Peraturan Gubernur DIY No 100 Tahun 2020, disebutkan bahwa pengelolaan BKK Dana Keistimewaan Kalurahan Mandiri Budaya dibagi menjadi

beberapa tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengendalian dan ketentuan terkait perubahan penggunaan anggaran dan sisa dana yang sudah terpakai. Dalam tahap perencanaan, perencanaan dilaksanakan secara partisipatif oleh Pemerintah Kalurahan bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan dan elemen Masyarakat lainnya. Setelah itu, hasil dari rancangan tersebut akan diusulkan kepada Gubernur melalui perangkat daerah pengampu kebijakan strategis Gubernur. Setelah usulan diterima, barulah kegiatan/program dapat dilaksanakan. Ketika kegiatan/program selesai dilaksanakan, maka Pemerintah Kalurahan wajib memberikan pelaporan kepada Gubernur melalui Panaradya Pati dengan tembusan kepada Bupati dan perangkat-perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan keuangan daerah dan perangkat yang mengampu kebijakan strategis Gubernur. Laporan pertanggungjawaban tersebut dapat disampaikan setelah kegiatan/program selesai atau paling lambat pada tanggal 20 (duapuluh) Desember tahun berjalan. Berikutnya akan dilakukan pengendalian oleh Panaradya Pati dan hasil pengendalian tersebut akan disampaikan kepada Gubernur. Dan apabila Pemerintah Kalurahan melakukan perubahan penggunaan anggaran, maka Kalurahan harus mengajukan revisi penggunaan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Bupati. Apabila terdapat sisa dana penggunaan maka dana sisa tersebut akan disetorkan kembali ke rekening kas umum DIY dan tidak dapat dijadikan penambah pagu anggaran tahun berikutnya.

e. Desa Mandiri Budaya

Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/kalurahan Mandiri Budaya. Desa/kalurahan Mandiri

Budaya adalah Desa/kalurahan/desakalurahan mahardika, berdaulat, berintegritas, dan inovatif dalam menghidupi dan mengaktualisasikan nilai-nilai keistimewaan melalui penggunaan dan peningkatan segala macam potensi kekayaan sumber daya alam maupun manusia dan kebudayaan-kebudayaan yang ada serta melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan, memberdayakan masarakt demi peningkatan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat dalam kebhinekaan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur No 36 Tahun 2014 Pasal 1 Desa/kalurahan Budaya adalah Desa/kalurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan melesetraikan kekayaan potensi budaya yang dimilikinya. Misalnya pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya. Desa/kalurahan Wisata merupakan kumpulan masyarakat yang bergerak pada bidang pariwisata yang mencakup atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung di dalam wilayah Desa dengan prinsip pariwisata berbasis masyarakat. Desa mandiri adalah status Desa yang tertinggi diantara empat status lainnya, dimana Desa mandiri memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang meningkat dan jumlah kemiskinan yang rendah.

Desa mandiri budaya adalah desa yang mandiri dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada, baik internal maupun eksternal desa. Ia juga secara aktif melibatkan warganya dalam proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk mengaktualisasikan, mengembangkan, dan melestarikan kekayaan potensi budaya material dan nonbendawi. Desa ini diharapkan bisa menjadi desa percontohan tentang

bagaimana bentuk Desa yang mandiri dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Jika biasanya desa lain masih bergantung kepada pemerintah daerah, desa ini diharapkan bisa berdiri di kaki sendiri. Desa ini pula dituntut untuk bisa menggali potensi-potensi yang mereka miliki karena potensi tersebutlah yang nantinya akan membantu mendongkrak perekonomian mereka, baik itu potensi benda maupun non benda.

Menurut (Kurniawan, 2015) bahwa ada beberapa cara membangun kemandirian Desa dari dalam, berikut merupakan cara-cara tersebut :

- a) Membangun kapasitas warga dan kapasitas berorganisasi masyarakat sipil di desa yang kritis dan dinamis. Proses pembentukan organisasi dan kelompok masyarakat sipil biasanya didorong oleh kekuatan luar yang membahayakan hak publik. kapasitas warga dan organisasi masyarakat bagaimanapun merupakan pilar penting bagi kedaulatan desa dan awal dari pembangunan masyarakat desa yang akan menjadi penyeimbang munculnya kebijakan publik yang tidak responsif di masyarakat. Dengan kapasitas masyarakat yang memumpuni maka masyarakat dapat bersaing secara sehat satu sama lain maupun dengan orang dari luar daerah mereka. Apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan dalam mengorganisir hal-hal strategis yang mereka butuhkan maka akan berbahaya bagi mereka sendiri karena akan menyebabkan gagalnya sebuah pelaksanaan kegiatan dan dengan adanya kegagalan tersebut akan membuat masyarakat malas mencoba hal-hal baru dan lebih memilih bertahan dengan cara-cara yang tradisional.

- b) Meningkatkan kapasitas pemerintah untuk memerintah dan meningkatkan interaksi dinamis dengan warga. Banyak contoh otonomi Desa didukung oleh kemampuan pemerintah Desa karena proses interaksi dinamis yang baik dengan organisasi masyarakat setempat. Jika menjumpai tokoh Desa setempat dengan karakter yang mau mendengarkan warga dan yang inovatif, maka interaksi yang dinamis antara organisasi masyarakat dan pemerintah Desa akan menjadi energi pembaharuan yang bernilai tambah bagi Desa tersebut. Kemampuan perangkat Desa dalam menyelenggarakan program dan kegiatan pembangunan hanyalah salah satu aspek dari kapasitas pemerintah Desa yang sedang diperkuat. Namun, hal itu juga terlihat dari fungsi BPD dalam menciptakan proses yang dinamis untuk merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan. Kemampuan pemerintah dalam memerintah dapat menentukan masa depan masyarakatnya. Berhubung otoritas tertinggi di sebuah Desa dimiliki oleh pemerintah Desa maka apapun yang dirancang dan dibuat oleh pemerintah Desa akan sangat berampak terhadap masyarakat.
- c) Membangun sistem perencanaan dan penganggaran masyarakat yang responsif dan inklusif. Sistem perencanaan yang terarah yang didukung oleh partisipasi warga yang efektif tentunya diperlukan untuk mewujudkan Desa yang mandiri dan berdaulat. Partisipasi masyarakat merupakan poin penting yang harus tetap dijaga keterlibatannya dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Partisipasi masyarakat dianggap penting karena dengan adanya partisipasi maka dapat dilakukan evaluasi apakah program

tersebut memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat atau malah sebaliknya.

- d) Membangun ekonomi lokal yang otonom dan efektif. Banyak inisiatif yang lahir di Desa dan saat ini berhasil berkembang untuk mendorong pemberdayaan ekonomi lokal. Kemampuan masyarakat untuk membuat rencana yang konsisten, kolaboratif, dan diterima dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Desa merupakan proses yang harus dilalui untuk mencapai keberhasilan (RPJMDesa, RKP Desa dan APB Desa). UMKM merupakan salah satu hal yang harus didukung pengembangannya di Desa. UMKM milik masyarakat sangat membantu mereka untuk dapat menjadi mandiri. Dukungan kepada masyarakat yang berusaha untuk mengembangkan ekonomi lokal dapat berdampak kepada kesejahteraan mereka. Dukungan yang diberikan dapat berupa modal ataupun pelatihan-pelatihan terkait usaha yang akan mereka kembangkan.

Pemerintah daerah Yogyakarta selalu mengawasi perkembangan Desa mandiri budaya sejak tahun 2019. Hal ini dilakukan karena mereka percaya dengan kehadiran Desa mandiri budaya ini maka potensi kebudayaan yang mereka miliki serta hasil alamnya sudah cukup untuk bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di Desa. Tetapi tentu saja untuk bisa mencapai tahap itu harus melewati proses-proses yang luarbiasa sulit dan banyak tantangan yang harus dihadapi.

Jadi status Desa Mandiri Budaya ini adalah sinergi antara empat status Desa lainnya. Gelar ini merupakan pencapaian tertinggi yang bisa diperoleh oleh sebuah Desa. Untuk dapat mencapai status Desa Mandiri Budaya, sebuah Desa harus melalui beberapa tingkatan status. Status tersebut adalah sebagai berikut;

a) Desa Budaya

Desa Budaya adalah Desa yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya (PERGUB DIY NOMOR 36 TAHUN 2014). Desa Budaya merupakan Desa yang menjadikan potensi seni dan budaya yang mereka miliki untuk membangun perekonomian mereka sekaligus dalam misi untuk mempertahankan kebudayaan yang mereka miliki. Desa ini memiliki tugas khusus dari daerah untuk bisa terus mengembangkan dan melestarikan potensi dan keunikan yang mereka miliki baik itu potensi dalam bentuk benda maupun non-benda. Program ini diciptakan memang untuk mendukung masyarakat Desa agar dapat menjadikan potensi-potensi yang mereka miliki, khususnya kebudayaan dapat menjadi tiang penyangga dalam ekonomi lokal.

b) Desa Prima

Desa Prima adalah sebuah Desa percontohan yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan sekaligus meningkatkan ekonomi perempuan dengan memanfaatkan semua potensi yang ada dengan melibatkan segenap peran lintas sektoral terkait (BPPMJogja, 2017). Seperti yang kita ketahui di masa sekarang ini masih banyak para perempuan yang terjebak di dalam rumah saja tanpa bisa mengeksplor potensi yang dia miliki. Para kaum perempuan, di tempat-tempat yang angka kemiskinannya masih tinggi biasanya hanya bekerja mengurus rumah dan pekerjaan lainnya. Melihat

kondisi ini maka pemerintah daerah memutuskan untuk lebih memberdayakan perempuan sehingga perempuan dapat membantu keluarganya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Desa Prima adalah Desa yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan yang ada di Desa tersebut. Desa prima nantinya akan memberikan pelatihan-pelatihan yang bisa berguna dalam meningkatkan perekonomian para perempuan. Misalnya, pelatihan membatik, pelatihan membuat kerajinan dan pelatihan lainnya yang bisa menghasilkan produk yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi mereka.

c) Desa Preneur

Desa Preneur merupakan salah satu Program Strategis Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi ekonomi desa guna mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan, dimana selama ini kita harus berhadapan dengan orientasi ekonomi yang tidak merata. Meskipun perekonomian peDesaan tidak berkembang secepat perekonomian perkotaan, namun tetap memiliki potensi yang unggul jika dikelola secara arif, benar, kreatif, dan berkelanjutan. Masyarakat dapat memanfaatkan potensi ekonomi Desa yang sangat besar. Desa Preneur merupakan solusi terhadap masifnya pertumbuhan semangat kewirausahaan yang luar biasa melalui optimalisasi sumber daya potensial. Kekayaan alam, bentang alam yang khas, peninggalan sejarah Desa, kegiatan pertanian, atraksi seni dan budaya, serta kearifan peDesaan merupakan intan yang menjadi kekuatan sebuah Desa yang unggul (SiBakulJogja, 2021). Desa Preneur merupakan

program yang mendukung terciptanya ekonomi lokal yang merata. Dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap Desa, harusnya ada beberapa komoditas yang bisa membantu mensejahterakan masyarakat apabila dikembangkan dengan baik. dengan harapan tersebut, maka terciptalah program Desa preneur yang memberikan dukungan kepada masyarakat-masyarakat di Desa untuk bisa hidup dari hasil pekerjaan mereka sendiri.

d) Desa Wisata

Desa wisata adalah kumpulan individu-individu yang tinggal berdekatan dalam jarak dekat, memiliki kedekatan untuk bisa melakukan interaksi langsung satu sama lain, dan siap untuk menggabungkan keterampilan individu mereka untuk berfungsi sebagai salah satu pendukung majunya sebuah wilayah atau lingkungan. Desa wisata diciptakan untuk memberdayakan masyarakat serta mendorong kesiapan dan pengetahuan mereka dalam hal menyikapi potensi wisata atau kawasan daya tarik wisata di lingkungan masing-masing Desa. (digitaldesa.id, 2020). Desa Wisata bertujuan untuk mengembangkan sumber manusia dan menyiapkan mereka sehingga mereka dapat menjadikan potensi yang mereka miliki menjadi sumber penghasilan. Desa wisata adalah dengan bonus geografis maupun bonus demografi dalam Desa mereka. Potensi yang dimaksud dapat berupa kebudayaan maupun alam, seperti air terjun, danau, dsb. Dengan potensi yang mereka miliki maka diharapkan mereka dapat mengembangkan potensi-potensi wisata alam, budaya dan sebagainya yang mereka miliki untuk meningkatkan perekonomian Desa. Potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi tempat

yang dapat menarik daya tarik wisatawan. Wisata yang dimaksud dapat berupa atraksi, tempat-tempat yang instagramable dengan menyediakan spot foto yang bagus serta kuliner-kuliner yang unik.

Berdasarkan kutipan di atas maka dapat dikatakan bahwa Desa Mandiri Budaya merupakan desa dengan status paling tinggi diantara status desa yang lainnya. Untuk bisa menjadi bagian dari program ini harus maka sebuah desa harus melewati proses tahapan-tahapan yang sangat sulit. Seluruh elemen masyarakat, budayawan, UMKM hingga perempuan pun juga harus mengambil bagian dalam proses mendapatkan status ini. Setelah semua elemen ini sudah tersinergi dengan baik maka lahirlah status tertinggi Desa Mandiri Budaya dengan segala keistimewaan yang dimilikinya. Dalam memperoleh status desa mandiri budaya, sebuah desa tentunya harus memenuhi kualifikasi yang diperlukan. Memiliki kebudayaan dan keunikan menjadi salah satu kualifikasi yang dibutuhkan, selanjutnya sebuah desa harus memiliki program untuk memberdayakan para perempuan yang ada di desa tersebut sehingga mereka dapat memiliki penghasilan sendiri, ekonomi lokal desa yang baik dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat pula, contohnya dengan lahirnya UMKM-UMKM milik masyarakat. Yang terakhir setidaknya desa mereka tersebut memiliki daya tarik wisata yang tinggi sehingga orang-orang berminat untuk hadir ke tempat tersebut. Status desa ini mengemban misi yang sangat berat karena mereka harus bisa memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Pemberdayaan sumber daya manusia bukanlah hal yang mudah, maka dari itu kekuatan besar yang diberikan kepada Desa penyandang status Desa mandiri budaya juga diiringi dengan tanggung jawab yang besar pula untuk bisa mensejahterakan masyarakatnya.

H. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif. Dijelaskan oleh Moleong bahwa karakteristik penelitian kualitatif deskriptif merupakan data-data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata atau narasi dan gambar tentang kondisi empirik (Moleong,2018). Sedangkan Nazir mengatakan tujuan dari penelitian deskriptif itu adalah untuk mendeskripsikan secara akurat tentang kebenaran, sifat dan hubungan sesama yang diteliti (Nazir, 2005:54).

Oleh karena itu penelitian ini bermaksud menggali lebih dalam fenomena yang ada melalui wawancara, observasi dan pemanfaatan dokumen tentang Otoritas Desa dalam Pengelolaan Dana Keistimewaan Desa Mandiri Budaya di Kalurahan Jerukwudel.

b. Unit Analisis

a) Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian tentang Otoritas Desa dalam Pengelolaan Dana Keistimewaan Desa Mandiri Budaya yang berlokasi di Kalurahan Jerukwudel, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b) Objek Penelitian

Objek yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah otoritas Desa dalam pengelolaan Dana Keistimewaan Desa Mandiri Budaya di Kalurahan Jerukwudel, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul.

c) Subyek Penelitian

Subjek penelitian terdiri dari Pemerintah Kalurahan Jerukwudel dan masyarakat yang berkecimpung di bidang kebudayaan beserta dengan para tokoh masyarakat setempat. Tokoh-tokoh khusus ini dipilih sebagai informan karena mereka berhubungan dengan objek penelitian dan dapat diandalkan untuk memberikan informasi dan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian..

Adapun tokoh-tokoh yang akan menjadi informan bagi penelitian ini adalah :

Tabel 1. 1 Informan Penelitian

NO	NAMA	JABATAN
1.	FAJAR WIJAYANTO	Lurah Kalurahan Jerukwudel
2.	BYAN PRASETYO	Carik Kalurahan Jerukwudel
3.	WASIMAN	Ketua BPKAL Kalurahan Jerukwudel
4.	Wulandari	Danarta Kalurahan Jerukwudel
5.	SUDARYANTA	Pangripta Kalurahan Jerukwudel
6.	TAUFIQ TRI	Dukuh Padukuhan Pudak B
7.	IDUK	Dukuh Padukuhan Karanggede B
8.	DWI SUTYO	Ketua Kelompok Sadara Wisata (POKDARWIS)
9.	SARNO	Tokoh masyarakat
10.	SLAMET WINARNO	Panewu Kapanewon Girisubo

c. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian kualitatif memiliki beberapa cara dalam melakukan pengumpulan data. Metode-metode tersebut adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

a) Observasi (Pengamatan)

Sebagai suatu pendekatan untuk mengumpulkan data, observasi biasanya dipahami sebagai mengamati keadaan lingkungan dan mencatat komponen-komponen yang terlihat pada objek penelitian. Komponen-komponen yang tampak itu disebut sebagai data atau informasi, yang harus diamati dan dicatat secara akurat dan lengkap. (Moleong, 2018). Jadi menurut peneliti, pengamatan merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian. Misalnya dengan memperhatikan keadaan sekitar tempat objek penelitian.

Dalam penelitian ini yang diobservasi oleh peneliti adalah Kewenangan Kalurahan dalam Pengelolaan Dana Keistimewaan Kalurahan Mandiri Budaya. Peneliti melakukan observasi terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan fisik/pengadaan peralatan untuk membuktikan apakah kebijakan-kebijakan yang mereka katakan melalui wawancara sesuai dengan keadaan di lapangan.

b) Wawancara (*Interview*)

Salah satu pendekatan untuk mengumpulkan data dan informasi dalam penelitian adalah dengan melakukan wawancara. Teknik ini digunakan karena dua alasan: pertama, memungkinkan

peneliti untuk meneliti apa yang informan ketahui, dan kedua, pertanyaan yang mereka ajukan dapat bersifat lintas waktu terkait dengan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Percakapan yang memiliki tujuan tertentu disebut wawancara. Dalam kegiatan ini minimal harus ada dua orang yang melakukan percakapan yaitu pewawancara yang bertugas untuk mengajukan pertanyaan, dan lawan bicara yang menanggapi pertanyaan-pertanyaannya. (Moleong, 2018: 186).

Peneliti melakukan wawancara dengan para pemangku kepentingan di Kalurahan Jerukwudel dan juga para tokoh masyarakat yang dianggap mampu untuk menjawab pertanyaan terkait Kewenangan Kalurahan dalam mengelola BKK Dais Mandiri Budaya. Peneliti melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan judul skripsi untuk bisa mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Proses wawancara setiap informan memakan waktu yang berbeda-beda. Peneliti mengajukan pertanyaan yang memancing informan untuk bisa bercerita terkait Desa Mandiri Budaya dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Hal tersebut dilakukan supaya ketika proses wawancara dilakukan, tidak ada perasaan canggung yang timbul.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan dan menganalisis dokumen-dokumen yang ada yang mempunyai hubungan dengan obyek penelitian

(Sugiyono, 2015:329). Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah dokumen yang dapat menunjang kevalidan informasi-informasi yang disampaikan oleh para informan. Salah satu dokumen yang Peneliti tampilkan adalah APBDES terkait BKK Danais khususnya Desa Mandiri Budaya.

d. Teknik Analisis Data

Tiga langkah utama yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono akan digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang sesuai dengan kerangka dan tujuan penelitian. (2017:134- 142), sebagai berikut:

a) Data Collection (Pengumpulan Data)

Dalam penelitian kualitatif, metode pengumpulan data antara lain dengan melakukan observasi, melakukan wawancara mendalam, mengumpulkan dokumentasi, atau menggunakan triangulasi dari metode-metode tersebut. Untuk memperoleh data yang lebih komprehensif, pengumpulan data dapat berlangsung selama sehari-hari atau bahkan berbulan-bulan.

Dalam tahap pengumpulan data, peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian. Penelitian dilakukan selama satu hari dan satu malam untuk melakukan wawancara. Sedangkan untuk observasi sendiri, peneliti tidak memerlukan banyak waktu dikarenakan peneliti sedikit lebih sudah mengetahui keadaan sekitar, mengingat bahwa peneliti melaksanakan kegiatan KKN (Kuliah, Kerja, Nyata) di lokasi tersebut.

b) Data Reduction (Reduksi Data)

Untuk menciptakan gambaran yang lebih baik dan memudahkan peneliti untuk melakukan lebih banyak pengumpulan data, reduksi data meliputi meringkas, memilih aspek-aspek penting, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema, dan pola. Saat mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh teori dan hasil yang diinginkan. Penekanan utamanya adalah pada temuan penelitian kualitatif. Proses reduksi data yang sulit membutuhkan kecerdasan tingkat tinggi serta keluasan, kedalaman, dan wawasan. (Sugiyono, 2017:137).

Dalam tahap ini, Peneliti mereduksi data-data yang peneliti peroleh ketika melakukan wawancara dan observasi. Data observasi peneliti kerucutkan sesuai dengan focus penelitian. Begitu pula dengan hasil wawancara, hasil wawancara bersama dengan para informan yang berlangsung selama beberapa puluh menit, peneliti reduksi dan kutip sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan focus penelitian yang sudah ditetapkan. Misalnya, pada focus penelitian bagian A peneliti memisahkan data yang berkaitan dengan hal tersebut sehingga dapat dianalisis dengan mudah, begitu juga dengan fokus penelitian dan bagian lainnya.

c) Data Display (Penyajian Data)

Langkah selanjutnya adalah menampilkan data setelah data yang diterima telah dirangkum. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa ringkasan singkat, infografis, korelasi antar kategori, dan diagram. Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2017:137), “the most frequent form of display data for qualitative research data in the past

has been narrative text”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Data yang Peneliti peroleh, disajikan dengan menampilkan data-data dan informasi yang Peneliti peroleh ketika melakukan observasi dan juga wawancara. Data-data tersebut sudah direduksi sedemikian rupa supaya analisis dapat dilakukan sesuai dengan fokus penelitian.

d) Verification atau Conclusion Drawing

Proses terakhir adalah menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan adalah hal baru yang belum pernah ada sebelumnya (Sugiyono, 2017:142). Penemuan-penemuan ini menyerupai deskripsi atau deskripsi suatu objek yang sebelumnya kabur atau tidak nyata sehingga menjadi jelas dengan pemeriksaan lebih dekat. Tujuan peneliti pada titik ini adalah membuat keputusan berdasarkan data yang masih tentatif dan dapat berubah jika tidak ada bukti kuat. Hasil tersebut nantinya akan ditunjukkan sebagai acuan dalam menjawab data dan permasalahan mengenai Otoritas Desa dalam Pengelolaan Dana Keistimewaan Desa Mandiri Budaya. Peneliti mengambil kesimpulan terhadap permasalahan berdasarkan data-data yang sudah peneliti rangkum sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

BAB II

DESKRIPSI KALURAHAN JERUKWUDEL

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

Jerukwudel merupakan salah satu Desa dari 144 (Seratus Empat Puluh Empat) Desa yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Desa tersebut merupakan bagian dari pemerintahan Kapanewon Girisubo. Kapanewon Girisubo terdiri dari 8 (Delapan) Desa. Kalurahan Jerukwudel terletak di pusat pemerintahan Kapanewon Girisubo. Kalurahan Jerukwudel terletak di sebelah tenggara Wonosari (Pusat Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul), sekitar 1 jam perjalanan dari Kota Wonosari atau sekitar 38 Km dari titik nol Wonosari. Desa tersebut di Gunungkidul merupakan bagian dari Zona selatan yang disebut kawasan Gunung sewu (Duizon Gebergton atau Zuider Gebergton), yang berada di ketinggian 0 m - 300 m mdpl (BAPPEDA Gunungkidul, 2016).

Kalurahan Jerukwudel sampai saat ini belum memiliki sumber air yang dapat mencukupi semua kebutuhan masyarakat saat musim kemarau. Dalam waktu satu tahun hujan hanya terjadi selama 89 (Delapan Puluh Sembilan) hari, dari 360 (Tiga Ratus Enam puluh) hari dalam satu tahun, dengan curah Hujan 1382 mm. Jumlah bulan terjadinya hujan hanya 4-5 Bulan, dengan suhu tertinggi 35 derajat celcius, dan suhu terendah 25 derajat celcius. Bulan Kemarau berlangsung selama 7-8 Bulan.

Ketika masuk pada bulan kemarau, masyarakat Jerukwudel tidak melakukan aktifitas pertanian karena tidak ada hujan yang menjadi sumber air untuk pengairan tanaman. Kecukupan air pada musim kemarau dilakukan

masyarakat dengan membeli air dan sebagian masyarakat menggunakan sarana air bersih dari PDAM. Masyarakat Kalurahan Jerukwudel mayoritas mempunyai pekerjaan sebagai petani dengan metode pertanian musiman (Pada musim penghujan) dengan periode panen satu tahun sekali dan menghasilkan hasil panen berupa Padi, Ketela, Jagung dan Kedelai.

Kalurahan Jerukwudel mempunyai luas wilayah sekitar 596,6 Ha, dan di bagi menjadi beberapa dusun yaitu Karanggede A, Karanggede B, Dompok, Bendo, Pudak A, Pudak B, Duwet dan Jerukwudel. Jumlah Peduduk di Kalurahan Jerukwudel 1965 Jiwa dengan rincian penduduk 979 jiwa Laki-Laki, dan 986 Perempuan, adapun jumlah KK di jeruk wudel yaitu 641 KK, dengan rincian 536 Kepala Keluarga Laki-Laki dan 105 Kepala Keluarga Perempuan.

Berikut merupakan tabel persebaran penduduk di setiap Padukuhan, Kalurahan Jerukwudel:

Tabel 2. 1 Persebaran Penduduk Kalurahan Jerukwudel

NO	NAMA PADUKUHAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Karanggede A	97	96	193
2.	Karanggede B	119	111	230
3.	Dompok	78	83	161
4.	Bendo	104	96	200
5.	Pudak A	85	96	181
6.	Pudak B	181	163	344
7.	Duwet	144	156	300
8.	Jerukwudel	171	185	356
TOTAL				1965

Melalui data di atas dapat kita pahami bahwa pusat persebaran penduduk ada di Padukuhan Jerukwudel dengan total 356 penduduk, sedangkan distribusi

penduduk dengan angka terendah adalah Padukuhan Dompok dengan total hanya 161 penduduk. Berdasarkan pengamatan peneliti, memang persebaran penduduk yang paling banyak berada di Padukuhan Jerukwudel, akan tetapi setiap perbedaan jumlah penduduk dari setiap padukuhan tidak begitu signifikan. Padukuhan Jerukwudel yang mana adalah juga pusat pelayanan Kapanewon Girisubo dan terdapat pasar yaitu Pasar Ngrancah membuat wilayah tersebut menjadi pusat perekonomian masyarakat Jerukwudel.

B. Visi dan Misi Kalurahan Jerukwudel

1. Visi Kalurahan Jerukwudel

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa serta mengandung pengertian bahwa Kalurahan Jerukwudel harus terus maju bertambah baik dan mengalami peningkatan di semua aspek kehidupan melalui pemerataan pembangunan yang berkelanjutan di segala bidang guna mewujudkan masyarakat Kalurahan Jerukwudel yang adil, makmur dan sejahtera. Pengembangan potensi wilayah merupakan upaya pemerintah Kalurahan Jerukwudel untuk memacu perkembangan social ekonomi, mengurangi kesenjangan social antar wilayah di Kalurahan Jerukwudel melalui upaya memperoleh Sumber Daya manusia (SDM) yang lebih bagus dan maju baik secara individu, kelompok ataupun komunitas untuk membentuk masa depan yang lebih baik.

Dengan mempertimbangkan kondisi dan permasalahan serta kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat 6 (enam) tahun ke depan, maka ditetapkan visi Kalurahan Jerukwudel periode kali ini adalah :

“MEWUJUDKAN JERUKWUDEL YANG MAJU, MANDIRI, BERMARTABAT, BERDAYA SAING DAN BERBUDAYA MENUJU KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.”

2. Misi Kalurahan Jerukwudel

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Jerukwudel dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Jerukwudel periode ini. Visi berada diatas misi, pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Berikut merupakan misi Kalurahan Jerukwudel :

1) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka peluang kerja untuk mengurangi pengangguran, dengan mendorong masyarakat menciptakan pekerjaan untuk dirinya sendiri.

Mengandung pengertian bahwa ekonomi masyarakat merupakan salah satu pilar penting. Masyarakat yang mandiri dan berpendapatan merupakan salah satu faktor utama majunya sebuah wilayah. Oleh karena itu, maka Pemerintah Kalurahan Jerukwudel berupaya untuk memberdayakan masyarakatnya dengan cara membuka peluang kerja dan memberdayakan pula potensi yang mereka miliki sehingga mereka sanggup untuk berdikari.

2) Pengelolaan kebudayaan masyarakat menjadi wisata budaya.

Mengandung pengertian bahwa Pemerintah Desa berupaya untuk mengubah potensi kebudayaan masyarakat setempat menjadi sesuatu yang dapat membuahkan hasil berarti. Kebudayaan yang mereka miliki dapat menjadi sumber penghasilan dengan menjadi Desa yang menawarkan budaya sebagai daya tarik wisata.

3) Pengembangan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur Desa, lembaga Desa, dan masyarakat.

Mengandung pengertian bahwa sumber daya manusia merupakan suatu hal yang penting. Oleh karena itu, pengembangan dan peningkatan kualitas aparatur desa, Lembaga-lembaga Desa dan masyarakat merupakan hal-hal strategis yang harus terus dikembangkan. Dengan SDM yang maju maka otomatis desa juga akan merasakan dampaknya secara langsung maupun tidak langsung. Metode yang akan dilaksanakan dalam misi ini adalah dengan melakukan pelatihan-pelatihan yang berguna bagi kehidupan masyarakat.

4) Meningkatkan penyediaan sarana prasarana infrastruktur Desa.

Mengandung pengertian bahwa perlu peningkatan untuk ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur Desa demi kenyamanan masyarakat.

5) Meningkatkan penguatan BUMKAL

Mengandung pengertian bahwa ekonomi masyarakat yang mapan adalah salah satu kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu kehadiran BUMKAL yang baik dan kuat dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat.

6) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan, pembinaan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Mengandung pengertian bahwa partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan, baik itu dalam hal pembuatan kebijakan maupun pelaksanaan merupakan hal yang vital. Oleh karena itu, dengan partisipasi yang baik dari masyarakat maka diharapkan segala macam kebijakan, pembangunan, kegiatan,

dsb dapat tercover karena semuanya berdasarkan suara dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

C. Kondisi Ekonomi Desa

1. Pasar Ngrancah

Di salah satu Padukuhan, yaitu Padukuhan Jerukwudel terdapat satu pasar tradisional yang beroperasi setiap "Kliwon" dan "Pahing". Masyarakat sekitar biasa menyebutnya "Pasar Ngrancah". Di Pasar ini banyak penjual yang memasarkan berbagai jenis barang/jasa, ada juga jual beli kambing & ayam. Penjual di Pasar Rancah berasal dari masyarakat lokal juga luar daerah. Biasanya pasar beroperasi sejak sore hari sampai keesokan harinya. Pasar ini merupakan pusat perekonomian masyarakat Kalurahan Jerukwudel dan Desa Tileng. Dengan keberadaan pasar Desa ini maka ekonomi masyarakat di kedua Desa tersebut dapat meningkat.

2. Wisata Budaya

Salah satu potensi unggulan juga yang ada di Kalurahan Jerukwudel adalah di sektor seni budaya. Biasanya setiap bulan di pertengahan tahun akan diadakan pertunjukan seni oleh masyarakat Jerukwudel. Dalam pagelaran seni tersebut ada banyak UMKM yang terkena imbasnya. Selain seni budaya, kuliner juga menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat. Kuliner tradisional seperti tiwul, badrek, dsb menjadi salah satu daya tarik pula ketika kegiatan diadakannya kegiatan yang menyangkut kesenian.

3. Kelompok Wanita Tani (KWT) Padukuhan Bendo dan Duwet

Kelompok Wanita Tani (KWT) adalah sebuah salah satu wadah yang mejadi harapan keluarga tani karena sumber daya yang ada didalamnya dapat

dimanfaatkan. Sebagai organisasi yang mewadahi kaum wanita tani dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan bagi keluarganya, kelompok wanita tani ini menanam berbagai tanaman pangan yang mudah perawatannya, proses produksi

dalam kelompok wanita tani padukuhan Duwet dan Bendo sangat memberikan dampak positif bagi masyarakat padukuhan khususnya yang mengikuti kelompok ini, didistribusi hasil panen ini dijual dipasarkan melalui media online dan hasil dari penjualan tersebut dimasukan kas kelompok, sebagian hasil produksi dijual ke warga dengan harga yang terjangkau.

D. Kondisi Geografis Kalurahan Jerukwudel

Kalurahan Jerukwudel merupakan Desa dengan luas wilayah paling kecil di bandingkan dengan wilayah Desa lain di Kapanewon Girisubo. Kalurahan Jerukwudel mempunyai batas wilayah dengan rincian sebagai berikut :

- Sebelah selatan dengan Desa Tileng, Kapanewon Girisubo.
- Sebelah Utara dengan Desa Nglindur, Kapanewon Girisubo.
- Sebelah Timur dengan Desa Pucung, Kapanewon Girisubo.
- Sebelah Barat dengan Desa Nglindur , Kapanewon Girisubo.

Kalurahan Jerukwudel termasuk ke dalam zona selatan gunungkidul yang disebut wilayah pengembangan Gunung Seribu (Duizon Gebregton atau Zuider Gebregton) dengan ketinggian 0 m - 300 m mdpl. Batuan dasar pembentuknya adalah batu kapur dengan ciri khas bukit-bukit kerucut (Conicsl limestone) dan merupakan kawasan karst. Pada wilayah ini banyak di jumpai sungai bawah tanah.

Kalurahan Jerukwudel merupakan wilayah yang beriklim tropis dengan suhu tertinggi 35 derajat celcius, dan suhu terendah 25 derajat celcius. Dengan topografi wilayah yang didominasi dengan daerah kawasan perbukitan karst yang banyak terdapat goa-goa alam dan juga sungai bawah tanah yang mengalir. Dengan kondisi tersebut menyebabkan kondisi lahan di wilayah tersebut kurang subur dan berakibat budidaya pertanian di kawasan ini kurang optimal.

E. Kondisi Demografi Kependudukan Kalurahan Jerukwudel

Demografi sendiri mempunyai pengertian dimana cakupannya berkaitan dengan penduduk seperti fertilitas, mortalitas, dan mobilitas. Suatu keadaan demografi di Desa menjadi salah satu faktor penunjang untuk melaksanakan pembangunan guna menciptakan perubahan kehidupan yang mengarah lebih baik. Perumbuhan penduduk yang ada Kalurahan Jerukwudel sendiri semakin lama semakin meningkat untuk disetiap tahunnya baik laki-laki maupun perempuannya.

Didalam kehidupan masyarakat Kalurahan Jerukwudel terdiri dari berbagai jenis latar belakang, mulai dari pendidikan, pekerjaan dan agama. Di bawah ini merupakan tabel data kependudukan berdasarkan pendidikan, pekerjaan dan agama.

Tabel 2. 2 Data Kependudukan berdasarkan Pendidikan

NO	KELOMPOK	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	TAMAT SD/ SEDERAJAT	338	361	699
2	SLTP/SEDERAJAT	242	216	458
3	TIDAK/ BELUM SEKOLAH	163	236	399
4	SLTA/SEDERAJAT	190	139	329
5	BELUM TAMAT SD	78	90	168
6	DIPLOMA IV/STATA 1	16	7	23
7	DIPLOMA/II	10	3	13
8	AKADEMI/ D III /S MUDA	5	4	9
9	STRATA III	0	0	0
10	STRATA II	0	0	0

Mengacu kepada data yang terdapat di table di atas maka dapat kita simpulkan bahwa penduduk Kalurahan Jerukwudel mayoritas hanya tamatan SD. Kemudian disusul yang telah tamat SLTP sebanyak 458 orang. Selain itu, yang tidak/belum sekolah menempati peringkat ketiga dengan jumlah 399 orang. Pendidikan juga ternyata adalah salah satu masalah yang harus diatasi oleh Pemerintah Desa. Berdasarkan hasil observasi Peneliti beberapa waktu yang lalu, memang anak-anak muda lulusan SMA/Sederajat cenderung tidak minat ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Mayoritas dari mereka memutuskan untuk langsung bekerja atau pergi merantau untuk bekerja. Hal ini menyebabkan sumber daya manusia dalam hal pendidikan masih terasa sangat kurang di Kalurahan Jerukwudel mengingat jumlah orang yang menempuh dan berhasil menyelesaikan perkuliahan hanya beberapa persen saja.

Tabel 2. 3 Tabel Data Kependudukan Berdasarkan Pekerjaan

NO	KELOMPOK	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	PETANI/ PEKEBUN	317	361	678
2	BELUM/ TIDAK BEKERJA	153	164	317
3	PELAJAR/ MAHASISWA	138	128	266
4	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	243	244
5	KARYAWAN SWASTA	152	60	212
6	BURUH HARIAN LEPAS	105	39	144
7	WIRASWASTA	62	24	86
8	BURUH TANI/ PERKEBUNAN	17	17	34
9	PEGAWAI NEGERI SIPIL	20	5	25
10	SOPIR	24	0	24
11	PERANGKAT DESA	15	6	21
12	PENSIUNAN	11	1	12
13	PERDAGANGAN	4	6	10
14	PEDAGANG	6	0	6
15	GURU	2	1	3
16	KEPOLISIAN RI/ POLRI	3	0	3
17	NELAYAN/PERIKANAN	3	0	3
18	KONSTRUKSI	1	0	1
19	SENIMAN	1	0	1
20	PEMBANTU RUMAH TANGGA	0	1	1
21	LAINNYA	1	0	1
22	PETERNAK	1	0	1
23	TRANSPORTASI	1	0	1
24	KARYAWAN HONORER	1	0	1
25	BURUH PETERNAKAN	1	0	1
26	KEPALA DESA	1	0	1

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Jerukwudel merupakan Petani/Pekebun dengan jumlah yang mencapai 678 orang. Tingkat pengangguran di Desa ini pula sangatlah tinggi dan menempati posisi kedua. Namun, meskipun begitu dalam hal pendidikan

menempati posisi ketiga yang mana itu adalah hal yang baik. Setelah itu di peringkat selanjutnya disusul oleh para ibu rumah tangga, wiraswasta dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Berdasarkan hasil observasi pula, memang mayoritas masyarakat Jerukwudel adalah petani. Keseharian mayoritas masyarakat Jerukwudel adalah pergi ke sawah pada pagi hari dan ketika sore menjelang malam hari. Namun peneliti tertarik melihat jumlah ibu-ibu rumah tangga yang sangat banyak jumlahnya. Sebagai Desa mandiri budaya yang di dalamnya terdapat pilar Desa Prima harusnya ini dapat menjadi potensi untuk dapat memberdayakan mereka mengingat tugas mereka yang hanya di rumah saja tanpa ada penghasilan.

Tabel 2. 4 Data Kependudukan Berdasarkan Agama

NO	AGAMA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	ISLAM	985	1005	1990
2	KRISTEN	12	9	21
3	KATHOLIK	18	15	33
4	HINDU	1	0	1
5	BUDHA	0	0	0
6	KHONGHUCU	0	0	0
7	KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME/ LAINNYA	26	27	53

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk beragama Islam dan di peringkat kedua diikuti oleh Kepercayaan Terhadap Tuhan YME atau agama tradisional. sedangkan sisanya diisi oleh agama Nasrani dan Hindu. Data tersebut diperkuat dengan hasil observasi Peneliti, bahwa fasilitas rumah peribadatan yang ada hanya untuk agama Islam. Sedangkan untuk Gereja dan fasilitas lainnya sama sekali tidak ada di Kalurahan Jerukwudel.

Kondisi seperti ini lumayan masuk akal mengingat agama Islam sebagai agama mayoritas.

F. Potensi dan Daya Tarik Desa Mandiri Budaya Jerukkwudel

1. Embung Ngrancah

Embung Ngrancah adalah salah satu objek wisata yang ada di Padukuhan Duwet, Jerukwudel. Selain memiliki pemandangan yang bagus, Embung Ngrancah juga memiliki sejarah yang membuat para pengunjung tertarik untuk menyambangi tempat tersebut. Padukuhan Duwet adalah salah satu dusun di Kalurahan Jerukwudel, Kapanewon Girisubo, yang memiliki salah satu tempat yang disakralkan, tempat tersebut terletak di daerah sekitaran Embung Ngrancah. Masyarakat sekitar menganggap bahwa tempat tersebut dijadikan sebagai tempat yang sangat disakralkan atau lebih dikenal dengan "Resan".

Luas Embung tersebut kurang lebih sekitaran 1 ha². Sebelum dijadikan embung, luas telaga tersebut melebihi luas yang sekarang akan tetapi luasnya dipersempit. Dahulunya telaga itu kedalamannya lumayan dalam, akan tetapi lama kelamaan akibat terkena lumpur atau tanah yang ikut mengalir di telaga tersebut mengakibatkan adanya proses pengendapan disitu sehingga telaga tersebut kedalamannya sudah tidak terlalu dalam. Masyarakat sekitar atau lebih tepatnya dusun Duwet hanya menjadikan tempatnya tersebut sebagai "Resan", walapun begitu disetiap pohon-pohon besar yang ada di daerah tersebut ada seseorang yang mendiami istilahnya adalah makhluk tak kasat mata menurut penuturan juru kunci.

Saat ini Embung Ngrancah merupakan tempat pusat pertunjukan seni di Kalurahan Jerukwudel dengan adanya panggung seni yang dibangun

menggunakan BKK Danais. Dengan adanya panggung terbuka tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi masyarakat untuk bisa melaksanakan pertunjukan-pertunjukan seni budaya yang menarik sehingga tujuan mereka untuk menjadi Desa Mandiri Budaya dapat terealisasi.

2. Kelompok Batik Tunas Mekar

Telah berdiri sebuah kelompok batik sejak tahun 2018. Kelompok batik ini dinamakan Kelompok Batik Tunas Mekar. Motif kain batik khas kelompok batik ini adalah Jeruk, diambil dari sejarah terbentuknya Kalurahan Jerukwudel. Anggota dan pengurus kelompok batik berjumlah sepuluh orang, diambil dari 2 padukuhan yaitu Padukuhan Dompok dan Karanggede B. Tujuan dibentuknya kelompok batik ini adalah untuk meningkatkan potensi dengan modal dari Kalurahan Jerukwudel supaya mengangkat perekonomian dan sebagai kegiatan ibu-ibu anggota kelompok batik ini dalam mengisi waktu luang yang dapat menghasilkan uang.

3. Seni, Adat dan Tradisi.

Kalurahan Jerukwudel memiliki banyak kesenian tradisional yang tersebar di setiap Padukuhan. Kesenian-kesenian tersebut merupakan kesenian yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu oleh para pendahulu di Kalurahan Jerukwudel. Untuk melestraikan budaya Kalurahan Jerukwudel juga memiliki macam-macam kelompok kesenian. Kelompok kesenian tersebut biasanya ditampilkan saat acara-acara tertentu terutama saat bersih dusun atau Rasulan. Melihat potensi yang ada di setiap padukuhan jika penggabungan antara menarik wisatawan untuk datang maka Kalurahan Jerukwudel dapat memanfaatkan grup

kesenian tersebut untuk tampil. Macam-macam kesenian yang ada di Kalurahan Jerukwudel adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 5 Nama Kesenian di Jerukwudel

NO	NAMA KESENIAN
1.	Reog Kuno
2.	Reog Jathil
3.	Macapat
4.	Dumbreng
5.	Wayang
6.	Hadroh
7.	Tari-tarian

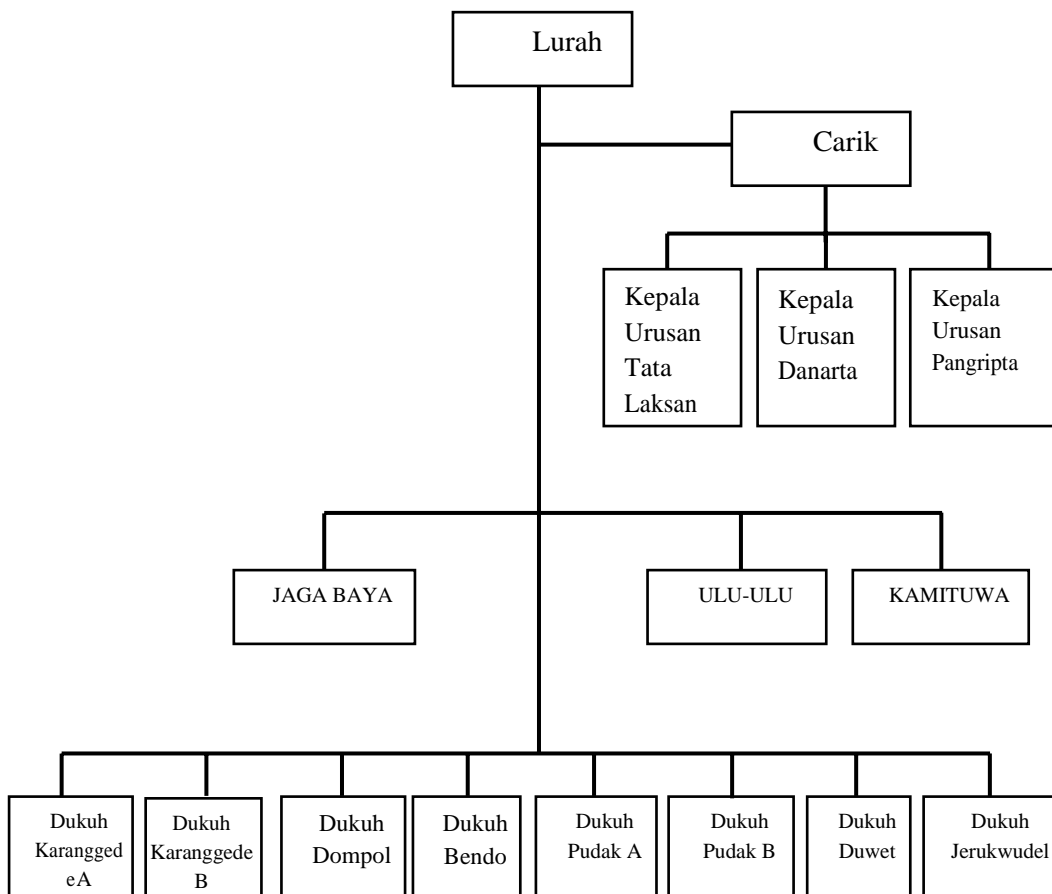
Selain kesenian, potensi lainnya yang dimiliki oleh Kalurahan Jerukwudel adalah potensi adat dan tradisi. Dalam kehidupan masyarakat Jerukwudel, mereka memiliki tradisi yang sudah dilakukan sedari dulu dan masih dilakukan hingga kini. Salah satunya yang paling terkenal adalah acara bersih dusun atau Rasulan. Acara ini biasanya dilaksanakan dalam waktu setahun sekali dengan memperhatikan penanggalan Jawa yang dipercaya oleh sesepuh padukuhan sebagai tanggal yang pas untuk melakukan acara bersih dusun atau biasa disebut dengan Rasulan. Adapun acara yang ada didalamnya yakni menyuguhkan kesenian tradisional yang ada di Padukuhan, kesenian yang disuguhkan oleh masyarakat biasanya seperti pagelaran wayang kulit semalam suntuk atau semalaman penuh sampai menjelang pagi. Dalam kegiatan ini pula terdapat kegiatan Genduri, yaitu acara doa dan makan bersama secara besar-besaran.

G. Aktor Yang Terlibat Dalam Pengelolaan BKK Dais Mandiri Budaya

Pemerintah Desa adalah lembaga tertinggi atau lembaga eksekutif yang ada pada struktur pemerintahan Desa yang mana mempunyai segala wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, Kalurahan Jerukwudel tentunya memiliki struktur organisasi yang tidak bisa lepas dari Struktur Administratif Pemerintahan di level atasnya yang dapat dilihat sebagai berikut:

Bagan 2. 1 Struktur Kalurahan Jerukwudel



(Sumber Buku Profil Kalurahan Jerukwudel, 2021)

Dari uraian Pemerintah Desa diatas dapat kita ketahui bahwa para aparaturnya Desa inilah yang memegang tongkat wewenang untuk dapat mengelola BKK DanaIs yang dihibahkan oleh Provinsi. Mereka adalah orang-orang yang dipercaya oleh daerah untuk dapat mengelola dana bantuan tersebut sehingga dengan begitu harapannya BKK tersebut dapat bermanfaat dan secara langsung maupun tidak langsung mampu untuk mendongkrak taraf hidup masyarakat yang ada di Kalurahan Jerukwudel.

H. Pengelolaan BKK Dais oleh Pemerintah Kalurahan Jerukwudel.

Kalurahan Jerukwudel memiliki sumber dana tambahan dari Pemerintah DIY yaitu BKK Dais untuk pembangunan penunjang Desa Mandiri Budaya baik itu fisik maupun non-fisik yang berfungsi untuk mensukseskan program Desa Mandiri Budaya. Di bawah ini akan peneliti paparkan data pengelolaan BKK Dais oleh pihak Pemerintah Kalurahan Jerukwudel. Data tersebut merupakan data tahun 2022 (Penerimaan BKK Danais tahap 1) dan data pengelolaan tahun 2023 (Penerimaan BKK Danais tahap 2). Data yang dimaksud dapat dibaca pada halaman selanjutnya.

Tabel 2. 6 BKK DAIS TAHUN 2022

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN
						Jumlah
1				2	3	4
a	b	c	d			
2	3	2	0	Ismiati	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan monumen/Gapura/Batas Desa (Papan nama Padukuhan)	57,924,000
2	8	9	1	Ismiati	Peningkatan Kapasitas pengelolaan Wisata milik Desa (Pelatihan Pokdarwis)	12,625,000
3	2	0	5	Ismiati	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana rasarana kebudayaan/Rumah adat/Keagaman milik Desa (Panggung Terbuka)	650,155,000
3	2	9	3	Ismiati	Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya (Pakaian bergodo)	72,295,000
3	2	9	6	Ismiati	Pembinaan dan pengembangan seni budaya (Pelatihan Managemen kesenian kerakyatan)	57,613,000
3	2	0	3	Ismiati	Penyelenggaraan festival kesenian/ adat kebudayaan dan keagaman	21,520,000
4	1	9	0	Parsiyati	Pelatihan olahan makanan berbahan dasar ikan	25,682,000
4	5	0	2	Ismiati	Pengembangan sarana prasarana UMKM (2 Kios)	63,774,000
4	7	0	4	Ismiati	Pelatihan olahan makanan dari pisang dan kripik sayur	38,412,000
						1,000,000,000

Berdasarkan data pada table di atas, kita dapat mengetahui bahwa pada tahap pertama BKK Dais yang diterima dan dapat dikelola oleh Pemerintah Kalurahan Jerukwudel adalah sebesar Rp1.000.000.000 (1 Milyar). Dana bantuan keistimewaan Mandiri Budaya tersebut kemudian digunakan untuk membangun/melengkapi kebutuhan penunjang wisata dan kebudayaan dengan salah satu contoh adalah dibangunnya Panggung Terbuka beserta perlengkapan penunjangnya untuk kebutuhan kegiatan kebudayaan. Sedangkan sisanya

digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan kebudayaan dan pelatihan peningkatan kapasitas preneur dan prima.

Data tersebut Peneliti dapatkan melalui wawancara dengan Danarta Kalurahan Jerukwudel. Setelah melakukan wawancara, Peneliti juga melakukan observasi terkait hal tersebut untuk memastikan apakah ada bentuk fisik dari program yang mereka ambil. Untuk informasi lebih detail, data dapat dilihat di table di atas. Selanjutnya untuk data pengelolaan Dais Mandiri Budaya pada tahap ke 2 (dua) dapat dilihat pada halaman selanjutnya.

Tabel 2. 7 BKK DAIS TAHUN 2023

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN
1						2
a	b	c	d			Jumlah
2	4	0	5	<i>Ismiati</i>	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Drainase Karanggede B)	100,652,900
2	8	0	2	<i>Ismiati</i>	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata	173,616,900
2	8	0	3	<i>Ismiati</i>	Pengembangan pariwisata tingkat Desa	171,215,000
3	1	9	1	<i>Agung Aribowo</i>	Pengadaan peralatan pendukung keamanan dan ketertiban masyarakat	89,170,200
3	2	0	3	<i>Ismiati</i>	Penyelenggaraan festival kesenian/ adat kebudayaan dan keagamaan	49,820,000
3	2	9	9	<i>Ismiati</i>	Lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan (Pawiyatan budaya)	37,180,000
3	4	9	9	<i>Ismiati</i>	Lain-lain sub bidang kelembagaan masyarakat	34,100,000
4	2	0	1	<i>Ismiati</i>	Peningkatan produksi tanaman	129,830,000
4	4	9	8	<i>Parsiyati</i>	Sosialisasi KDRT dan perlindungan anak	4,435,000
4	7	0	4	<i>Ismiati</i>	Kelompok ekonomi produktif	9,980,000
						800,000,000

Berdasarkan data pada table di atas, pada tahap ke-2 (dua) Pemerintah Desa kembali menerima BKK Dais dengan nominal yang berbeda. Khusus untuk program Desa Mandiri Budaya sebesar Rp 800.000.000. Pada tahap ke-2 (dua) ini pembangunan fisik dan pengadaan alat-alat penunjang masih tetap dilakukan. Sisa dari dana tersebut kembali dialokasikan untuk penyelenggaraan kegiatan kebudayaan dan keagamaan dan peningkatan ketahanan pangan. Kegiatan kebudayaan disini yang dimaksud adalah mensupport kegiatan Rasulan di setiap Padukuhan. Kegiatan tersebut memang dilaksanakan setahun sekali untuk mengucap syukur atas hasil pekerjaan masyarakat selama setahun. Dalam kegiatan tersebut nantinya akan ada pertunjukkan kebudayaan sesuai dengan ciri khas budaya yang dimiliki oleh setiap Padukuhan. Contohnya adalah pertunjukkan Bergodo di Padukuhan Pudak B, pertunjukkan wayang kulit di Padukuhan Jerukwudel, pertunjukkan Jathilan di beberapa Padukuhan dan masih banyak lagi pertunjukkan terkait seni dan budaya lainnya. Untuk informasi lebih lengkap dapat dibaca pada table di atas.

BAB IV

KESIMPULAN dan SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis di bab pembahasan di atas, Peneliti menemukan bahwa Pemerintah Kalurahan Jerukwudel tidak memiliki otoritas penuh dalam mengelola BKK Dais, bahkan hanya sedikit. Dapat kita lihat bahwa otoritas yang dimiliki oleh pihak Kalurahan Jerukwudel hanyalah sebatas untuk menampung aspirasi dan merancang program/pembangunan model apa yang ingin mereka laksanakan sesuai dengan aspirasi yang mereka dapat dari perwakilan setiap Padukuhan dan tokoh masyarakat setempat. Kewenangan untuk mengambil keputusan final ada di tangan Dinas Panaradya Kaistimewaan. Dalam pengelolaan Dais Mandiri Budaya, Kalurahan hanya berperan sebagai objek saja. Hal tersebut karena Kalurahan dalam Peraturan Gubernur No 100 Tahun 2020 dikatakan bahwa harus menyerahkan usulan yang telah Pemerintah Kalurahan rembuk kan dengan Masyarakat kepada Gubernur. Setelah itu Kalurahan hanya sebagai pelaksana apabila usulan tersebut diterima.

Kemudian untuk kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Desa terkait program Desa mandiri daya ini dapat dilihat bahwa pembangunan yang dilakukan lebih berfokus kepada pembangunan fisik. Misalnya seperti pembangunan panggung terbuka di Embung Ngrancah, pemeliharaan sanitasi dengan pembangunan drainase di Padukuhan Karanggede B, pembangunan drainase di Embung Ngrancah, pengadaan perlengkapan atribut seni bergodo, ketoprak dan kesenian lainnya, pengadaan sound system sebagai penunjang kegiatan kebudayaan dan pengadaan papan tanda keistimewaan di Desa dan di

setiap Padukuhan. Setelah itu sisa dari bantuan dais dialokasikan untuk peningkatan UMKM, pemberdayaan perempuan, macam-macam pelatihan untuk mengembangkan potensi masyarakat, penyelenggaraan kegiatan kebudayaan dan peningkatan ketahanan pangan. Namun berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan para informan, program yang dilaksanakan terfokus kepada pembangunan fisik sehingga pengembangan kapasitas sumberdaya manusia nampaknya belum efektif. Dapat dilihat bahwa perkembangan produk UMKM lokal tidak ada progres sama sekali. Saat ini UMKM lokal Jerukwudel masih stagnan dan penghasilan yang didapatkan belum sesuai harapan dan bahkan bisa dikatakan tidak ada penghasilan sama sekali apabila sedang tidak ada event.

Terkait kesesuaian penggunaan BKK Danais Kalurahan Mandiri Budaya oleh Kalurahan Jerukwudel, berdasarkan hasil wawancara dan observasi pula peneliti menyimpulkan bahwa semua kebijakan yang diambil sudah tepat dan penggunaan dana yang diberikan pula sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengatur terkait Desa Mandiri Budaya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah DIY baiknyatidak hanya menjadikan Kalurahan sebagai objek pmeangunan belaka, akan tetapi juga diberikan kewenangan dengan pendampingan yang baik supaya Kalurahan dapat menentukan nasibnya sendiri.

2. Perlu adanya evaluasi untuk melihat apakah keempat pilar dari Desa mandiri budaya sudah terjamah dengan baik.
3. Pihak Pemerintah Kalurahan Jerukwudel harus meningkatkan kemampuan untuk mendistribusikan sumber daya yang mereka miliki, yaitu BKK Danais. Dapat dilakukan dengan memetakan potensi yang dimiliki oleh Kalurahan Jerukwudel dan setelah itu merancang prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan.
4. Pemerintah Kalurahan harus meningkatkan perhatian terhadap pengembangan ekonomi lokal melalui peningkatan UMKM dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu bidang wisata juga harus diberikan support lebih agar wisata yang ada di Jerukwudel dapat berkembang. Misalnya dengan memberi bantuan fasilitas penunjang tempat wisata seperti wahana-wahana permainan supaya tempat tersebut terlihat lebih menarik dan menyenangkan.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL, SKRIPSI dan THESIS

- Andayani, A. A. I., Martono, E., & Muhamad, M. (2017). Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa wisata dan implikasinya terhadap ketahanan sosial budaya wilayah (studi di Desa wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 1-16.
- Damanik, J. (2005). *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press. Dokumen Desa Kemadang Tahun 2018.
- Harjo, B. (2017). Model Membangun Desa Mandiri. *Jurnal Sosial dan Humanis Sains (JSHS)*, 2(1).
- Kooiman, Jan. 1994. Dalam Jurnal Wahyu, Mardiyanto. Triyantmoko. 2016. Pemekaran Daerah dan Persoalan *Governablity* Lokal di Indonesia, Diakses pada 5 April 2023 pada link ejournal.politik.lipi.go.id.
- Kusumastuti, N. (2018). Strategi mempercepat pembangunan Desa mandiri: studi di Desa Kemadang Gunungkidul. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 2(1), 177-198.
- Marbun, S. F. (1996). Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan dan Otoritas. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 3(6), 28-43.
- Pangestu, R. P. A. G. (2016). Upaya Pengembangan Desa Wisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi pada Desa Wisata Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul). *Publika*, 4(10).
- PRADANA, D. S. (2022). *Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Desa Mandiri Budaya di Desa Wisata Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)*. Tryatmoko,
- M. W. (2016). Pemekaran daerah dan persoalan *governablity* lokal di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 7(1), 13.
- Risanti, F., & Winarni, F. (2018). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Wukirsari Di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 7(3), 291-302
- VGA, N. A., Kusumawati, A., & Hakim, L. (2018). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa wisata serta dampaknya terhadap perekonomian warga di Desa Tulungrejo Kota Batu. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol, 61(3).

BUKU

- Eko, Sutoro. 2013. *Daerah Inklusif: Pembangunan, Demokrasi Lokal dan Kesejahteraan*. Yogyakarta: IRE (Institute for Research and Empowerment).
- Eko, Sutoro. 2014. *Kedudukan dan Kewenangan Desa*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Jakarta, hlm 6
- Fakrulloh, Zudan. 2014. *Hukum Indonesia dalam Berbagai Prespektif*, cetakan pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.74

- Kurniawan, B. (2015). *Desa Mandiri. Desa Membangun (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia).*
- Marbun, S. (2016). PEMERINTAHAN BERDASARKAN KEKUASAAN DAN OTORITAS. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 3(6), 28–43.
- Moleong, L. J. 2018. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, cet. In XI. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salahudin, M. 2015. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Cetakan Pertama, Kementrian Desa PDPT RI, Jakarta, hlm, 12
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Soekanto Soerjono. 2015. *sosiologi suatu pengantar*. Jakarta. PT. Raja Grafindo
- Terry, George R. 2014. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Bumi Aksara: Jakarta
- Profil Kalurahan Jerukwudel 2021

UNDANG-UNDANG dan PERATURAN

- Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 36 Tahun 2014 Tentang Desa/Kalurahan Budaya)
- Permendesa Pasal 3 Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- Peraturan Gubernur Diy No 93 Tahun 2020 Tentang Desa Mandiri Khusus Keistimewaan (Bkk) Dana Keistimewaan
- Pasal 42 Undang-Undang Keistimewaan
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 100 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Keistimewaan Desa Mandiri Budaya

SITUS WEBSITE

- [Desa Preneur DISKOPUKM DIY \(jogjaprovo.go.id\)](http://jogjaprovo.go.id)
- [Apa itu Desa Wisata? | DigitalDesa.id](http://DigitalDesa.id)
- [Enam Tujuan Mulia Program Desa Mandiri Budaya Paniradya Kaistimewan DIY - Halaman 3 - Tribunjogja.com \(tribunnews.com\)](http://tribunnews.com)
- [Halo Apa Kabar Desa Kantong, Rintisan, dan Desa Budaya Bersinergi Dengan Dunia Wisata Budaya - Kalurahan Gerbosari \(gerbosari-kulonprogo.desa.id\)](http://gerbosari-kulonprogo.desa.id)

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Hari / Tanggal :
Nama Lengkap :
Usia :
Pendidikan Terakhir :
Jabatan/Posisi :

PERTANYAAN	
Hak Pemerintah Desa dalam pengelolaan BKK DanaIs	
1.	Kewenangan seperti apa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah DIY kepada Pemerintah Desa dalam pengelolaan BKK DanaIs tersebut?
	Bagaimana kewenangan Desa terkait dengan pengelolaan BKK DanaIs?
2.	Apa saja hak-hak yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dalam mengelola BKK DanaIs?
3.	Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam menjalankan otoritasnya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Desa terutama dalam mengelola BKK DanaIs?
4.	Apakah ada kebijakan yang telah disusun oleh Pemerintah Desa dalam mengelola BKK DanaIs?
5.	Apakah Pemerintah Desa memiliki regulasi atau kebijakan khusus terkait pengelolaan dana keistimewaan?
6.	Seberapa besar pengaruh penggunaan otoritas oleh Pemerintah Desa dalam mengelola DanaIs terhadap kesuksesan program Desa Mandiri Budaya?
7.	Bagaimana kinerja Pemerintah Desa dalam menjalankan otoritas tersebut di mata masyarakat?
8.	Apakah suksesnya program Desa mandiri budaya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat?

9.	Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan BKK DanaIs?
10.	Apakah ada transparansi dalam proses pengelolaan BKK DanaIs tersebut?
11.	Apa yang dilakukan Pemerintah Desa dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam mengelola BKK DanaIs?
12.	Bagaimana proses pengelolaan BKK DanaIs oleh Pemerintah Desa?
13.	Apakah Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk menentukan prioritas dalam penggunaan BKK DanaIs?
Kebijakan Pemerintah Desa pengelolaan BKK Dana Keistimewaan.	
14.	Sejauh ini BKK DanaIs sudah digunakan untuk apa saja?
15.	Kebijakan apa saja yang sudah diambil terkait pengelolaan BKK DanaIs?
16.	Di masa depan kebijakan-kebijakan seperti apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa?
17.	Bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa agar dapat mengelola BKK DanaIs dengan tepat sasaran?
18.	Apakah BKK DanaIs sangat bermanfaat bagi pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi masyarakat Jerukwudel?
19.	Apakah Pemerintah Desa pernah melibatkan masyarakat dalam mengambil kebijakan tentang pengelolaan BKK DanaIs?
20.	Apa kontribusi masyarakat desa dalam mengelola BKK DanaIs?
21.	Bagaimana Pemerintah Desa merespon hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan?
22.	Apakah ada peraturan yang mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam mengelola BKK DanaIs?
23.	Bagaimana upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan kapasitas untuk mengelola BKK DanaIs?

Kesesuaian penggunaan BKK DanaIs dengan Peraturan Gubernur DIY	
24.	Bagaimana implementasi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa terkait dengan BKK DanaIs?
25.	Apa saja kegiatan dan proyek yang telah berhasil dilaksanakan menggunakan BKK DanaIs?
26.	Bagaimana cara Pemerintah Desa memastikan bahwa setiap kebijakan yang mereka ambil sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku?
27.	Bagaimana koordinasi antara Pemerintah Desa dan Instansi terkait dalam pengelolaan BKK DanaIs?
28.	Apakah ada evaluasi secara berkala tentang pengelolaan BKK DanaIs?
29.	Apakah Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk melaksanakan evaluasi mandiri secara berkala?



Foto bersama Pak Fajar, Lurah Jerukwudel



Foto bersama Pak Byan, Carik Jerukwudel



Foto bersama Pak Sudaryanta, Pangripta Jerukwudel



Foto bersama Mba Wulandari, Danarta Jerukwudel



*Foto bersama Pak Slamet Winarno, Panewu
Girisubo*



Foto bersama Pak Taufik, Dukuh Pudak B



Foto bersama Pak Edu, Dukuh Karanggede B



*Foto bersama Pak Dwi Sutyo, Ketua
MPOKDARWIS Jerukwudel*



*Foto bersama Bapak Wasiman, Ketua BPKAL
Jerukwudel*



Foto bersama Bapak Sarno, Tokoh Masyarakat Jerukwudel